

**ANALISIS PENGARUH DANA KEISTIMEWAAN TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Oleh:

Nama : Davina Salsabila
Nomor Mahasiswa : 22313052
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2025

ANALISIS PENGARUH DANA ISTIMEWA TERHADAP KEMISKINAN DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

Guna memperoleh gelar sarjana jenjang Strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan,

Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Davina Salsabila

Nomor Mahasiswa : 22313052

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak terdapat bagian yang dikategorikan terdapat ke dalam tindakan plagiasi seperti yang tertera pada buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa penyusunan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Februari 2026

Penulis,



Davina Salsabila

BERITA UJIAN



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uui.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nomor: 023/Ka.ProdiEp/10/Prodi.Ep/UTA/IV/2025

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Genap 2025/2026, hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : DAVINA SALSABILA
NIM : 22313052
Judul Tugas Akhir : Analisis Pengaruh Dana Keistimewaan Terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta
Dosen Pembimbing : Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A
Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.
Anggota Tim : Lak lak Nazhat El Hasanah, SE.,M.Si.

Yogyakarta, 12 Maret 2026

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan,



Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D.
NIK. 963130101

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Pengaruh Dana Keistimewaan Terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Disusun oleh : DAVINA SALSABILA

Nomor Mahasiswa : 22313052

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Kamis, 12 Maret 2026

Penguji/Pembimbing Skripsi : Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.

Penguji : Lak lak Nazhat El Hasanah, SE.,M.Si.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

MOTTO

“It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop”

- Confucius

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN

PENGARUH DANA ISTIMEWA TERHADAP KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Oleh:

Nama : Davina Salsabila
Nomor Mahasiswa : 22313052
Program studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 20 Februari 2026

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Keistimewaan Terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta” dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di yaumul akhir, Aamiin. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Lebih dari itu, proses penyusunan skripsi ini menjadi perjalanan yang penuh pembelajaran, tantangan, sekaligus pengalaman berharga bagi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis menjadi salah satu faktor yang membuat karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dan berterima kasih atas segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai kendala dan rintangan. Namun, berkat doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas setiap napas yang masih Engkau izinkan, atas kesehatan, kekuatan, dan jalan yang selalu Engkau bukakan di saat penulis merasa buntu. Terima kasih atas pertolongan yang sering kali datang di waktu yang tidak terduga, atas hati yang terus dikuatkan ketika lelah dan ragu menghampiri.
2. Yth. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, atas kepemimpinan dan lingkungan akademik yang mendukung proses belajar penulis.
3. Yth. Bapak Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D., selaku Kepala Program Studi Ilmu Ekonomi, atas arahan serta dedikasi dalam memajukan program studi.
4. Yth. Bapak Dr. Sahabuddin Sidiq, S.E., M.A., selaku Kepala Jurusan Ilmu Ekonomi, atas dukungan dan perhatian selama masa perkuliahan.
5. Yth. Bapak Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph. D. , selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas kesabaran yang begitu luas, atas waktu yang tetap diluangkan

ditengah kesibukan, serta atas setiap arahan untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Yth. Bapak Prastowo SE., M.Ec., Dev, selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu membantu dalam setiap proses akademik sejak awal perkuliahan hingga penulis berada di titik akhir ini.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Untuk Ibu tercinta Ibu Ruri, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, serta kesabaran dalam menghadapi segala dinamika dan keluh kesah penulis selama proses ini. Dukungan, perhatian, dan keteguhan hati Ibu menjadi sumber kekuatan utama yang mengantarkan penulis hingga berada di tahap ini.
9. Untuk Ayah tersayang Ayah Yaji, terima kasih atas dukungan, pengorbanan, dan tanggung jawab yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Segala usaha dan kerja keras Ayah menjadi pondasi utama yang mendukung penulis menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Setiap doa, perhatian, dan kepercayaan yang Ayah berikan menjadi sumber kekuatan yang tidak ternilai dalam perjalanan ini.
10. Untuk adik tercinta Kayla terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat sederhana yang selalu menguatkan penulis dalam setiap proses yang dijalani. Kehangatan dan kebaikan hati yang dimiliki menjadi sumber ketenangan tersendiri, terutama di saat penulis menghadapi berbagai tantangan selama penyusunan skripsi ini. Perhatian dan ketulusan yang diberikan, meskipun sering kali disampaikan dengan cara yang sederhana, memiliki arti yang sangat besar dan menjadi pengingat bagi penulis untuk terus berusaha memberikan yang terbaik. Semoga setiap kebaikan dan ketulusan hati yang dimiliki senantiasa dijaga, serta segala impian dan cita-cita yang ingin diraih dimudahkan jalannya oleh Allah SWT.
11. Untuk Om Dwi dan Tante Dwi tercinta, terima kasih atas perhatian, doa, dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran dan kepedulian Om dan Tante menjadi penguat tersendiri dalam setiap proses yang penulis jalani. Terima kasih atas nasihat, semangat serta rasa kekeluargaan yang membuat penulis selalu merasa memiliki tempat untuk kembali dan dikuatkan. Serta Thito dan Yola sepupu tercinta, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang membuat perjalanan ini

terasa lebih hangat. Kehadiran keluarga menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan memiliki rumah untuk kembali.

12. Untuk sahabat seperjuangan selama perkuliahan Dwi Meilina, Naziratul Ulfa, Della Berliana, Auliani Fadillah, Assyfa Riskia, Talitha Ardelia. Terima kasih telah saling menguatkan dikondisi apapun, saling mengingatkan ketika hampir menyerah, dan tetap berjalan berdampingan sampai di titik akhir ini. Perjalanan ini tentu akan terasa berat tanpa kehadiran dan dukungan yang diberikan.
13. Untuk Nadya Aprilia sahabat SMA penulis, terima kasih telah menjadi bagian dari masa tumbuh yang penuh cerita. Dari bangku sekolah hingga hari ini, doa dan dukungan akan tetap terasa. Terima kasih sudah pernah percaya pada mimpi-mimpi kecil yang saat itu mungkin terlihat sederhana, namun kini menjadi langkah besar dalam hidup penulis.
14. Untuk teman seperjuangan Aisyah Khazini, Tarisa Arnianti, Shafira Firly, Salwa Avririnda, Jihan Tsabitah. Terima kasih telah menjadi teman bertumbuh, selalu hadir, memberi saran, menguatkan, dan tetap ada dalam setiap proses jatuh bangun ini. Terima kasih atas kehadiran yang sangat berharga.
15. Untuk teman-teman SMA penulis Dinda Berliana, Adelia Anggreini, Halmar Bintang, Dylan Farrel. Terima kasih atas kebersamaan serta dukungan yang pernah diberikan selama masa sekolah hingga saat ini.
16. Kepada seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, namun kehadirannya pernah memberi warna dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang pernah diberikan.
17. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada diri sendiri yang telah berproses dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki. Terima kasih atas ketekunan, kesabaran, serta keberanian untuk terus melangkah meskipun tidak jarang dihadapkan pada rasa lelah, ragu, dan tekanan selama proses penyusunan skripsi ini. Perjalanan ini tidak selalu mudah, namun penulis memilih untuk tetap bertahan, belajar dari setiap kesalahan, dan memperbaiki diri di setiap tahap yang dilalui. Terima kasih karena tidak menyerah ketika keadaan terasa berat, karena tetap berusaha meskipun hasil belum selalu sesuai harapan, dan karena terus meyakinkan diri bahwa setiap proses memiliki waktunya sendiri. Pencapaian ini bukan hanya tentang gelar akademik, tetapi juga tentang pembuktian bahwa dengan kesungguhan dan doa, setiap tantangan dapat dilalui dengan baik. Semoga ke depannya penulis

dapat terus menjadi pribadi yang lebih kuat dan konsisten dalam memperjuangkan setiap impian yang ingin diraih.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT serta menjadi amal kebaikan yang membawa keberkahan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 20 Februari 2026

Penulis,

Davina Salsabila

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
BERITA UJIAN	iv
MOTTO	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	11
2.1 Kajian Pustaka.....	11
2.2 Landasan Teori.....	19
2.2.1 Konsep dan Pengertian Kemiskinan.....	19
2.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan.....	20
2.2.3 Teori-Teori Kemiskinan.....	22
2.2.4 Pengaruh Antar Variabel.....	24
2.3 Kerangka Pemikiran.....	27
2.4 Hipotesis Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	31
3.2.1 Variabel Dependen.....	31
3.2.2 Variabel Independen.....	32
3.3 Metode Analisis Data.....	33
3.3.1 Estimasi Regresi Data Panel.....	34
3.4 Uji Statistik.....	36

3.4.1	Uji F	36
3.4.2	Uji Parsial T.....	36
3.4.3	Koefisien Determinasi (R-Squared)	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		38
4.1	Deskripsi Data Penelitian	38
4.2	Statistik Deskriptif.....	38
4.3	Hasil Analisis dan Pembahasan	40
4.3.1	Estimasi Regresi Data Panel	40
4.3.2	Pemilihan Model Regresi.....	41
4.4	Model Regresi Terbaik.....	42
4.4.1	Uji Statistik	43
4.4.2	Pembahasan.....	45
4.4.3	Analisis Intersep.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI		54
5.1	Kesimpulan.....	54
5.2	Implikasi.....	55
5.3	Saran	56
Daftar Pustaka		58
LAMPIRAN.....		61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2025	2
Gambar 1. 2 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota DIY Tahun 2017-2024.....	3
Gambar 1. 3 Pagu Dana Istimewa Kabupaten/Kota DIY Tahun 2017-2024	6
Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kajian Pustaka	14
Tabel 4. 1 Analisis Deskriptif.....	38
Tabel 4. 2 Common Effect.....	40
Tabel 4. 3 Fixed Effect.....	41
Tabel 4. 4 Hasil Uji Chow	42
Tabel 4. 5 Cross Section Fixed Effect	52

ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun berstatus sebagai daerah istimewa dan memperoleh alokasi Dana Keistimewaan, permasalahan kesejahteraan masyarakat, khususnya tingkat kemiskinan, tetap memerlukan perhatian yang serius. Dana Keistimewaan diharapkan mampu memperkuat pembangunan daerah sekaligus mendorong penurunan angka kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Keistimewaan (DAIS), dana transfer pemerintah pusat yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta variabel ekonomi lainnya seperti investasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan di lima kabupaten/kota di DIY selama periode 2017–2024. Data yang digunakan berupa data panel dengan lima unit cross-section dan delapan periode waktu pengamatan. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) yang dipilih berdasarkan hasil uji Chow. Hasil estimasi menunjukkan bahwa Dana Keistimewaan (DAIS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan kedua jenis dana tersebut cenderung diikuti oleh penurunan angka kemiskinan. Sebaliknya, Dana Alokasi Umum (DAU) dan pertumbuhan ekonomi memiliki arah pengaruh negatif, namun tidak signifikan secara statistik. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) dan investasi justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan TPT berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa instrumen fiskal daerah, khususnya Dana Keistimewaan dan DAK, relatif lebih efektif dalam menekan kemiskinan dibandingkan variabel ekonomi makro lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan pemanfaatan Dana Keistimewaan dan DAK agar lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap pengelolaan DBH serta arah investasi juga diperlukan agar kebijakan yang diambil lebih inklusif dan benar-benar mendukung pengurangan kemiskinan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Dana Keistimewaan, Dana Transfer, Investasi, Data Panel, Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB I

PENDAHULUAN

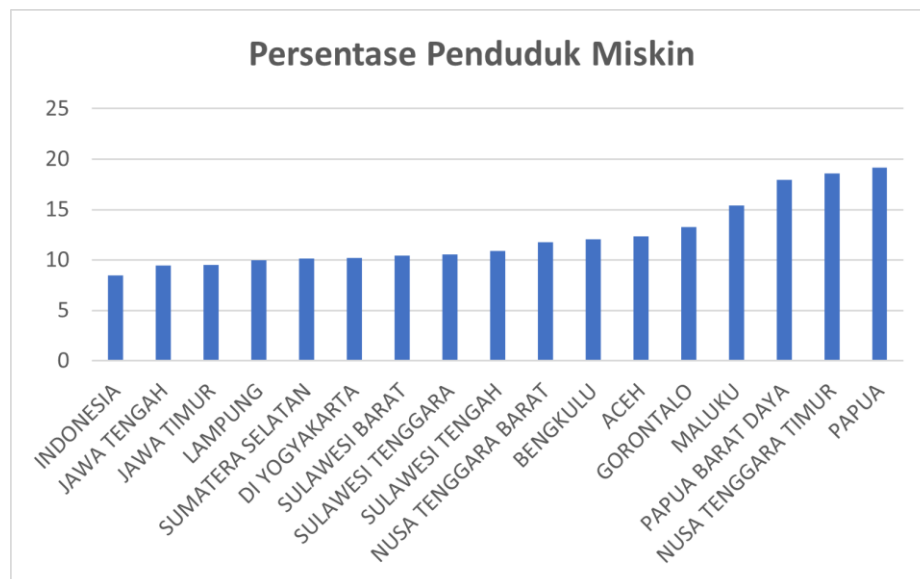
1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang dialami oleh hampir semua negara di dunia. Negara Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki penduduk miskin cukup tinggi yang tersebar di berbagai daerah. Menurut (Busti, 2022) kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan ekonomi individu atau rumah tangga dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata yang berlaku di suatu wilayah. Kondisi ini ditandai dengan rendahnya tingkat pendapatan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Kemiskinan juga mencerminkan tidak adanya kenikmatan hidup yang layak, di mana ketersediaan kebutuhan dasar tidak sebanding dengan kebutuhan minimum untuk mempertahankan efisiensi fisik. Selain itu menurut (Nurwati, 2008) kemiskinan tidak hanya diartikan sebagai rendahnya pendapatan atau konsumsi seseorang dibandingkan dengan standar kesejahteraan tertentu, seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan. Lebih dari itu, kemiskinan mencakup ketidakmampuan individu untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar nonmateri, seperti memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan lingkungan yang bersih serta layak untuk ditempati. Kondisi seperti ini menyebabkan suatu individu atau rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Selain itu, kemiskinan juga sering kali memunculkan penyebab ketimpangan sosial dan rendahnya sumber daya manusia.

Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Indonesia secara umum menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan rilis (Badan Pusat Statistika, 2025) persentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,47 persen, menurun 0,10 persen poin dibandingkan September 2024, serta menurun 0,56 persen poin dibandingkan Maret 2024. Meskipun demikian, penurunan tersebut belum terjadi secara merata di seluruh wilayah. Masih terdapat perbedaan tingkat kemiskinan yang cukup besar antar provinsi, yang menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antar daerah. Beberapa provinsi telah berhasil menekan angka kemiskinan hingga relatif rendah, namun di sisi lain masih terdapat provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan cenderung berlangsung dalam jangka waktu lama.

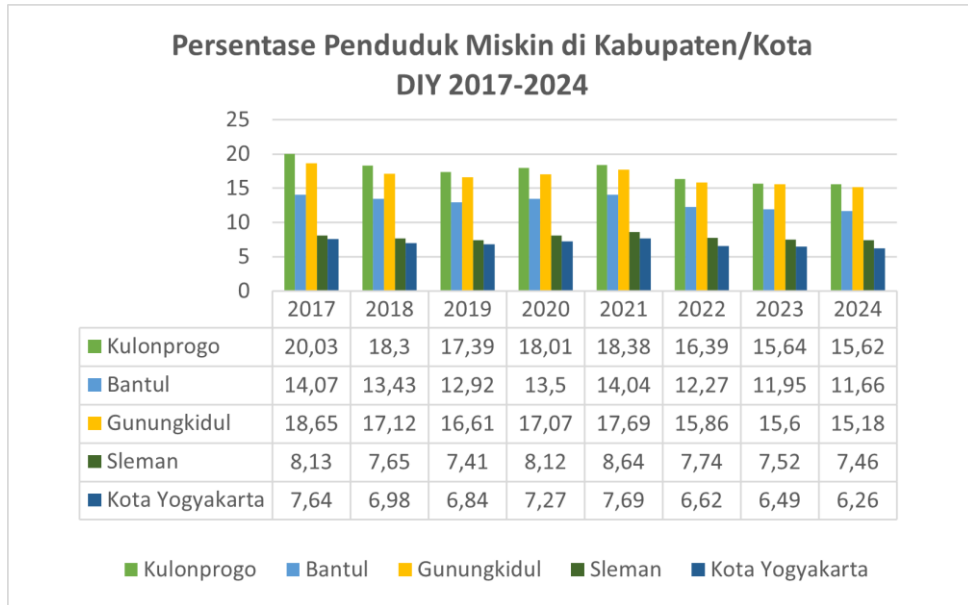
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipilih sebagai lokasi penelitian karena secara konsisten termasuk dalam kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Kondisi ini menarik untuk dikaji karena DIY dikenal sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata,

serta memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup baik. Namun demikian, capaian pembangunan tersebut belum sepenuhnya mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Hal ini menunjukkan adanya fenomena paradoks pembangunan, yaitu ketika kualitas pembangunan manusia tergolong tinggi, tetapi tingkat kemiskinan masih relatif besar. Untuk memperkuat alasan pemilihan DIY sebagai objek penelitian, diperlukan perbandingan tingkat kemiskinan antar provinsi di Indonesia. Perbandingan tersebut bertujuan untuk menunjukkan posisi DIY dalam konteks nasional dan menegaskan bahwa permasalahan kemiskinan di DIY merupakan isu yang penting untuk diteliti. Selain itu, kondisi ini juga memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak hanya terjadi di daerah yang tertinggal, tetapi juga dapat ditemukan di daerah yang secara ekonomi dan sosial tergolong maju.



Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2025

Sumber: (BPS, 2025), diolah.



Gambar 1. 2 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota DIY Tahun 2017-2024

Sumber: (BPS, 2025), diolah.

Berdasarkan Gambar 1.2, persentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama periode 2017–2024 menunjukkan kecenderungan menurun, meskipun sempat mengalami peningkatan pada periode 2020–2021. Berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota di DIY menunjukkan perbedaan yang cukup jelas. Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin relatif lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Pada tahun 2017, persentase penduduk miskin di Kulon Progo tercatat sebesar 20,03 persen dan menurun menjadi 15,62 persen pada tahun 2024. Sementara itu, Gunungkidul pada tahun 2017 berada pada angka 18,65 persen dan menurun menjadi 15,18 persen pada tahun 2024.

Tingginya kemiskinan di Kulon Progo dan Gunungkidul dapat dikaitkan dengan karakteristik ekonomi wilayah yang cenderung lebih agraris, ketergantungan pada sektor primer, serta keterbatasan akses terhadap pusat pertumbuhan ekonomi. Aktivitas ekonomi di kedua wilayah tersebut masih didominasi oleh pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam, yang pada umumnya memiliki produktivitas dan nilai tambah yang lebih rendah dibandingkan sektor industri dan jasa. Selain itu, kondisi geografis yang relatif jauh dari pusat perkotaan menyebabkan peluang kerja formal, akses pendidikan, dan akses layanan ekonomi modern tidak sebaik wilayah yang berada dekat dengan pusat kegiatan ekonomi.

Sebaliknya, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta menunjukkan persentase kemiskinan yang lebih rendah dan relatif stabil. Pada tahun 2017, Sleman tercatat sebesar 8,13 persen dan menurun menjadi 7,46 persen pada tahun 2024, sedangkan Kota

Yogyakarta menurun dari 7,64 persen pada tahun 2017 menjadi 6,26 persen pada tahun 2024. Rendahnya kemiskinan di kedua wilayah tersebut dapat dikaitkan dengan peran Sleman dan Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan pendidikan, perdagangan, jasa, serta pariwisata yang menyediakan lebih banyak peluang kerja dan aktivitas ekonomi dengan nilai tambah lebih tinggi. Kabupaten Bantul berada pada posisi menengah dengan persentase penduduk miskin sebesar 14,07 persen pada tahun 2017 dan menurun menjadi 11,66 persen pada tahun 2024. Perbedaan tingkat kemiskinan antarwilayah tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di DIY tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi makro, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah, tingkat urbanisasi, serta akses terhadap pusat pertumbuhan. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan di DIY perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah agar kebijakan yang dirancang dapat lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing kabupaten/kota.

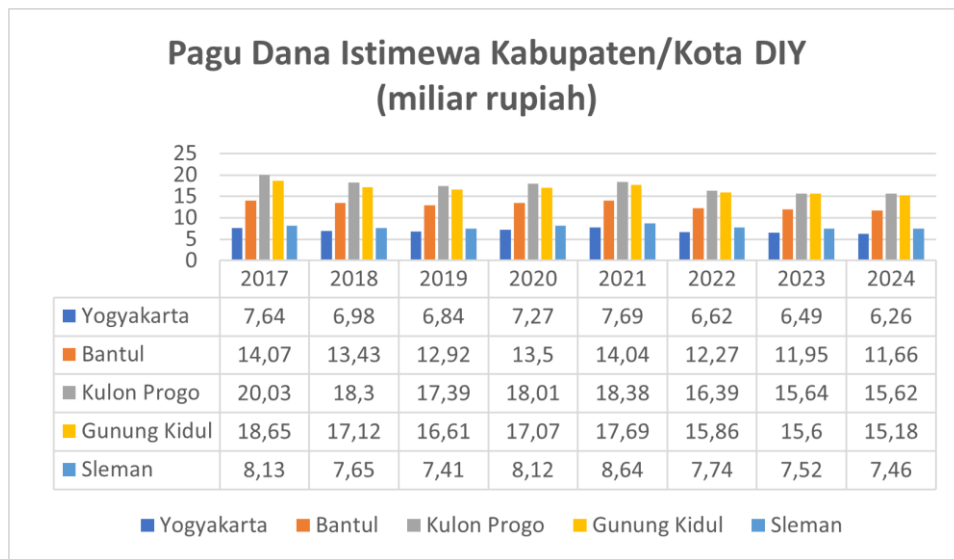
Pada tingkat nasional, pemerintah memberikan status khusus kepada sejumlah provinsi yang memiliki keistimewaan tertentu. Ada lima provinsi dari berbagai daerah di Indonesia yang mendapat perlakuan istimewa dengan adanya undang-undang tersendiri yang mengatur otonomi dan kebijakan lokal mereka (Sekar Arum et al., 2021). Kelima provinsi yang mendapat status istimewa tersebut adalah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diatur oleh (Undang-Undang Nomor 44, 1999) dan (Undang-undang Nomor 11, 2006) yang mengatur tentang otonomi khusus berbasis syariat Islam, DKI Jakarta yang diatur oleh (Undang-undang Nomor 29, 2007) yang mengatur perihal tata kelola sebagai daerah khusus ibu kota negara, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki (Undang-Undang Nomor 13, 2012) yang diakui sebagai pemerintahan kesultanan dan keistimewaan budaya, Papua dan Papua Barat diatur oleh Undang-Undang (Undang-undang Nomor 21, 2001) yang memberikan otonomi khusus terkait pengelolaan kekayaan alam dan hak masyarakat adat. Adanya undang-undang khusus ini menunjukkan penghormatan pemerintah terhadap keunikan setiap provinsi serta memberikan upaya untuk menjaga keadilan serta keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang dikenal luas sebagai kota pelajar dan pusat kebudayaan Jawa. Selain itu, DIY juga menyandang status keistimewaan yang telah diatur didalam (Undang-Undang Nomor 13, 2012) tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut (Kementerian Keuangan, 2023) Dana Keistimewaan merupakan bentuk alokasi fiskal dari pemerintah pusat yang diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berdasarkan (Undang-Undang Nomor 13, 2012) tentang Keistimewaan DIY. Dana tersebut dimanfaatkan untuk

mendukung pelaksanaan kewenangan keistimewaan daerah yang meliputi bidang tata ruang, kelembagaan, kebudayaan, pertahanan, serta tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Status ini memberikan wewenang khusus dalam berbagai urusan diantaranya dalam hal kelembagaan, pertahanan, tata ruang, kebudayaan, dan yang paling penting adalah alokasi Dana Istimewa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DAIS ini dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan keistimewaan yang bertujuan untuk kemajuan, kesejahteraan serta kedamaian masyarakat di DIY. Meskipun DIY dikenal sebagai kota dengan kualitas pendidikan yang baik dan sektor pariwisata yang maju, namun pada realitanya kondisi sosial dan ekonomi menunjukkan adanya tantangan serius, terutama dalam hal kemiskinan. Di tengah kondisi sebagai destinasi unggulan dan kota pelajar yang maju, DIY seringkali menempati posisi sebagai kota dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di pulau Jawa. Data dari (BPS, 2025) menunjukkan bahwa angka kemiskinan di DIY pada tahun 2017 sebesar 13,02 persen dan meskipun mengalami penurunan hingga 10,83 pada tahun 2024 namun angkanya masih relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang angkanya menunjukkan sebesar 8,57 persen pada September 2024. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dana Keistimewaan disalurkan kepada masyarakat baik dalam bentuk bantuan langsung maupun tidak langsung melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan. BKK Dana Keistimewaan yang bersifat tidak langsung diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui program pengembangan dan pelestarian budaya, salah satunya melalui pembentukan Rintisan Kalurahan Budaya (Aini & Suharto, 2024). Menurut (Pemerintah Kabupaten Bantul, 2023) Rintisan Kalurahan Budaya merupakan tahapan awal yang diberikan kepada suatu kalurahan dalam proses pembinaan menuju kalurahan budaya yang berkelanjutan. Pada tahap ini, kalurahan difokuskan pada pelaksanaan berbagai program yang bertujuan untuk melestarikan sekaligus mengembangkan potensi budaya lokal, meliputi adat istiadat, seni dan kesenian, bahasa daerah, kerajinan, kuliner tradisional, serta peninggalan budaya yang bersifat fisik. Pengembangan tersebut diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, BKK Dana Keistimewaan juga disalurkan secara langsung kepada masyarakat, antara lain melalui pemanfaatan tanah kas desa yang disewa oleh pemerintah daerah dan digunakan

oleh masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin, dengan tujuan meningkatkan kegiatan ekonomi dan menekan angka kemiskinan di wilayah terkait.



Gambar 1. 3 Pagu Dana Istimewa Kabupaten/Kota DIY Tahun 2017-2024

Sumber: (Bapperida DIY, 2025), diolah.

Data pagu Dana Keistimewaan pada grafik disajikan dalam satuan miliar rupiah. Penyajian dalam bentuk angka desimal dilakukan untuk menyederhanakan nilai agar lebih mudah dibandingkan antar kabupaten/kota dan antar tahun.

Berdasarkan gambar 1.3 terlihat adanya perbedaan penerimaan antarwilayah yang cukup konsisten. Secara umum, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah dengan pagu DAIS tertinggi, sedangkan Kota Yogyakarta menjadi wilayah dengan pagu DAIS terendah, diikuti oleh Kabupaten Sleman. Tingginya pagu DAIS pada Kulon Progo dan Gunungkidul dapat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang cenderung lebih luas dan memiliki kebutuhan pembangunan yang lebih besar, terutama pada sektor-sektor yang berkaitan dengan pengembangan wilayah, pemerataan, serta pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, rendahnya pagu DAIS pada Kota Yogyakarta dapat dipahami karena Kota Yogyakarta memiliki wilayah administratif yang lebih kecil dibanding kabupaten lainnya, sehingga kebutuhan pendanaan program relatif lebih rendah.

Dana Keistimewaan untuk DIY yang merupakan salah satu sumber pendanaan khusus yang diberikan pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan kewenangan istimewa dan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat masih menunjukkan temuan yang beragam. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa DAIS belum memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan jika dilihat dari

persentase penduduk miskin, sementara penelitian lain menemukan adanya pengaruh, tetapi relatif kecil dan terbatas pada sektor atau wilayah tertentu. Perbedaan temuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif Dana Keistimewaan dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan di DIY.

Di sisi lain, tingkat kemiskinan di suatu daerah tidak hanya dipengaruhi oleh Dana Keistimewaan, tetapi juga oleh berbagai faktor ekonomi lainnya yang dalam penelitian ini dimasukkan sebagai variabel bebas. Variabel bebas tersebut meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka. Menurut (Nany, 2022) DAU, DAK, dan DBH merupakan transfer dana dari pemerintah pusat yang memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan kesempatan kerja.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi daerah, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin besar potensi peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka menggambarkan proporsi angkatan kerja yang belum terserap dalam pasar kerja, sehingga cenderung berkaitan dengan tingginya risiko kemiskinan di suatu wilayah. Dengan demikian, kelima variabel tersebut dipandang berpotensi mempengaruhi kondisi kemiskinan dan relevan untuk dianalisis dalam penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di DIY serta menilai apakah Dana Keistimewaan telah berfungsi secara efektif sebagai salah satu instrumen kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan di DIY.

Beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis pengaruh Dana Keistimewaan dan dana transfer pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian (Aini & Suharto, 2024) menemukan bahwa Dana Keistimewaan (Danais) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hasil yang serupa juga ditemukan oleh (Faosi & Halim, 2022) serta (Riskha & Haribowo, 2021) yang menyatakan bahwa Dana Keistimewaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Namun demikian, temuan berbeda ditunjukkan oleh (Farida, 2019) dan (Pangestu, 2022). (Farida, 2019) menyimpulkan bahwa Dana Keistimewaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sementara (Pangestu, 2022) menemukan bahwa Dana

Keistimewaan justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Dana Keistimewaan dalam menurunkan kemiskinan masih menimbulkan hasil perbedaan antar penelitian.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut, terlihat adanya *research gap* mengenai pengaruh Dana Keistimewaan dan dana transfer pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kembali pengaruh Dana Keistimewaan terhadap tingkat kemiskinan di DIY periode 2017–2024 dengan menggunakan metode regresi data panel serta memasukkan variabel kontrol berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Keistimewaan terhadap kemiskinan di DIY?
2. Bagaimana pengaruh DAU, DAK, DBH terhadap kemiskinan di DIY?
3. Bagaimana pengaruh investasi, pertumbuhan ekonomi, dan TPT berpengaruh terhadap kemiskinan di DIY?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Keistimewaan (DAIS) terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis pengaruh investasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah:

Penelitian ini memberikan informasi penting yang dapat digunakan oleh penelitian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengelola Dana Istimewa dan variabel terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan.

2. Bagi Dunia Akademik:

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya terkait pengaruh dana keistimewaan dalam menanggulangi kemiskinan. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik untuk meneliti pembangunan daerah dan pengelolaan dana publik.

3. Bagi Masyarakat:

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai Dana Keistimewaan serta dana tranfer yang diterima oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Bagi Peneliti:

Penelitian ini menjadi salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Selain itu, proses penelitian ini memberikan tambahan wawasan serta pengalaman praktis dalam melakukan analisis data, memahami permasalahan pembangunan, dan mengasah kemampuan berpikir kritis.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan adalah sebuah penjelasan singkat atau gambaran kecil mengenai penulisan guna memudahkan proses penulisan.

1. Bab 1 Pendahuluan

Pada bab 1 ini penulisan berisi latar belakang, rumusan masalah, manfaat serta tujuan dari isi penelitian ini.

2. Bab 2 Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Pada bab 2 ini berisi uraian mengenai tinjauan pustaka yang memuat hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik ini, serta pemaparan berbagai teori yang digunakan sebagai landasan dalam menjelaskan permasalahan penelitian. Selain itu, bab ini juga mencakup penyusunan kerangka berpikir dan perumusan hipotesis penelitian.

3. Bab 3 Metode Penelitian

Pada bab 3 ini berisi tentang penguraian jenis dan metode pengumpulan data, penjabaran label yang menjelaskan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian, serta metode analisis yang diterapkan untuk mengolah dan menafsirkan data.

4. Bab 4 Hasil Analisis dan Pembahasan

Pada bab 4 ini berisi tentang pembahasan hasil pengujian yang dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah sebelumnya.

5. Bab 5 Kesimpulan dan Implikasi

Pada bab 5 ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta memberikan pemaparan dan saran yang berkaitan dengan hasil temuan pada penelitian tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan menelusuri dan mempelajari teori-teori yang sudah ada sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Tinjauan pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang telah diterbitkan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Oleh karena itu, kajian pustaka menjadi bagian yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah dan selalu disertakan di dalamnya (Aprilyada et al., 2023).

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Aini & Suharto, 2024) yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Keistimewaan Terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta” menambahkan variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai variabel pendukung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian regresi data panel dari tahun 2017 hingga 2022. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dana Keistimewaan (Dais) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan Dana Alokasi Khusus menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Dana Bagi Hasil (DBH) justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di DIY. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel Dana Keistimewaan, DAU, DAK, dan DBH serta metode regresi data panel, namun penelitian periode penelitian ini dari tahun 2017-2022.

Penelitian (Faosi & Halim, 2022) yang diberi judul “Pengaruh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kemiskinan” menggunakan pendekatan difference-in-difference selama periode 2010-2019 untuk menganalisis tiga indikator kemiskinan, yaitu persentase penduduk miskin, indeks kedalaman, dan keparahan kemiskinan. Hasilnya menunjukkan bahwa Dana Keistimewaan belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di DIY, meskipun ada upaya peningkatan alokasi dana tiap tahun.

Penelitian (Farida, 2019) meneliti tentang pengaruh Dana Keistimewaan, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY pada periode 2014-2017. Data yang digunakan berupa data sekunder dari seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Peneliti menggunakan metode kuantitatif

dengan analisis regresi data panel dan menerapkan model random effect di tingkat signifikan 5%. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Dana Keistimewaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus juga berpengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Yogyakarta.

Penelitian (Pangestu, 2022) dengan judul *Analysis Performance of Tax Effort and Privilege Funds Influencing Economy of Special region of Yogyakarta in 2014-2019* mengkaji pengaruh Dana Keistimewaan terhadap kondisi perekonomian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2014-2019. Penelitian ini juga menilai perkembangan usaha perpajakan selama masa berlakunya Undang-Undang Keistimewaan. Metode yang digunakan bersifat kuantitatif dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan perkembangan data serta analisis regresi untuk mengetahui Dana Keistimewaan terhadap beberapa indikator ekonomi. Data yang digunakan berupa data panel yang mencakup data time series dari tahun 2014 hingga 2019 dan data cross section dari lima kabupaten/kota di wilayah Yogyakarta. Variabel dependen penelitian meliputi persentase kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan total PDRB, sehingga variabel independennya adalah Dana Keistimewaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode tersebut, upaya perpajakan mengalami peningkatan, Dana Keistimewaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, serta berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita dan total PDRB. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa peran Dana Keistimewaan perlu ditingkatkan agar manfaat ekonomi bagi daerah dapat lebih optimal.

Penelitian (Riskha & Haribowo, 2021) mengkaji pengaruh Dana Keistimewaan terhadap kondisi perekonomian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2014–2019. Penelitian ini juga menilai peran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap angka kemiskinan sebagai variabel dependen. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan data tahun 2014–2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Keistimewaan dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan, sedangkan PAD dan DAU memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh (AULIA, 2021) berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan di

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” bertujuan untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan memengaruhi tingkat kemiskinan di DIY selama periode 2004–2020. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Bappeda DIY, serta berbagai jurnal terkait, dengan variabel yang dianalisis meliputi kemiskinan sebagai variabel dependen serta pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sebagai variabel independen. Metode yang digunakan adalah Error Correction Model (ECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan. Sementara itu, dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi tetap berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan pendidikan dan kesehatan justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai kemiskinan dan penggunaan pendekatan kuantitatif, sedangkan perbedaannya terdapat pada metode analisis yang digunakan serta periode waktu penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Noreen, 2020) yang berjudul “Analisis Pengaruh Faktor PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2018” bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, jumlah penduduk, inflasi, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2002–2018. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi DIY dan BAPPEDA Provinsi DIY. Penelitian ini menggunakan model regresi data time series dengan metode Ordinary Least Square (OLS) sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di DIY, sementara perbedaannya terdapat pada variabel yang digunakan, metode analisis yang dipakai, serta periode waktu penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fani & Hartono, 2025) yang berjudul “Pengaruh Inflasi dan Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2021” membahas permasalahan kemiskinan sebagai isu utama di Indonesia yang dipicu oleh tingginya jumlah penduduk sehingga menimbulkan ketimpangan kesejahteraan serta kesenjangan ekonomi dan sosial. Penelitian ini

menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif kausal untuk menganalisis pengaruh inflasi dan pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2007–2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan inflasi dan pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara parsial, inflasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, demikian pula pengangguran terbuka yang juga berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki peran penting dalam memengaruhi tingkat kemiskinan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai kemiskinan di DIY dan penggunaan pendekatan kuantitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel yang dianalisis serta periode waktu penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Shafiyah, 2025) bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan, rata-rata lama sekolah, pertumbuhan ekonomi, dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2009–2023. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena tingginya tingkat kemiskinan di DIY meskipun pertumbuhannya cenderung positif dan relatif konsisten dibandingkan daerah lain di Pulau Jawa. Data yang digunakan merupakan data sekunder runtun waktu dari lima kabupaten/kota di DIY yang diperoleh dari BPS dan Bappeda DIY. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan pengujian asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai kemiskinan di DIY serta penggunaan pendekatan kuantitatif, sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel yang digunakan, metode analisis, serta periode waktu penelitian.

Tabel 2. 1 Kajian Pustaka

No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	(Aini & Suharto, 2024) “Analisis Pengaruh Dana Keistimewaan Terhadap Kemiskinan di	- Variabel independen : DAIS, DAU, DAK, DBH - Metode : regresi data panel	- Periode penelitian: 2017–2024 - Penelitian menambah variabel	Dana Keistimewaan (DAIS) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap

No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2017-2022”		independen lain: investasi, pertumbuhan ekonomi, TPT	kemiskinan di DIY. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di DIY.
2.	(Faosi & Halim, 2022) “Pengaruh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kemiskinan”	- Menggunakan Dana Istimewa sebagai variabel utama	- Menggunakan regresi data panel - Periode penelitian: 2017-2024 - Menggunakan variabel independen lain: DAU, DAK, DBH, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, TPT	Dana Keistimewaan belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di DIY, meskipun terdapat peningkatan alokasi dana pada setiap tahunnya.
3.	(Farida, 2019) “Analisis Pengaruh Dana Keistimewaan (DAIS), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemiskinan Masyarakat di DIY Tahun 2014-2017”	- Menggunakan variabel independen DAIS, DAU, DAK - Menggunakan metode regresi data panel	- Menggunakan variabel independen lain: DBH, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan TPT - Periode Penelitian: 2017-2024	Dana Keistimewaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DIY. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di DIY.
4.	(Pangestu, 2022) “Analysis Performance of Tax Effort and Privilege Funds Influencing Economy of Special Region of Yogyakarta in	- Menggunakan variabel utama DAIS - Menggunakan metode regresi data panel	- Periode Penelitian: 2017-2024 - Menggunakan variabel independen lain: DAU, DAK, DBH Investasi,	Dana Keistimewaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu, Dana Keistimewaan juga berpengaruh positif dan signifikan

No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	2014-2019. Journal of Economics and Policy.”		Pertumbuhan Ekonomi, dan TPT	terhadap PDRB per kapita serta total PDRB di DIY selama periode 2014–2019.
5.	(Riskha & Haribowo, 2021) ”Pengaruh Dana Keistimewaan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Angka Kemiskinan di DIY Tahun 2014-2019”	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel utama DAIS - Menggunakan variabel pendukung DAU dan DAK 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metode regresi data panel - Periode Penelitian: 2017-2024 - Menggunakan variabel independen lain: DBH, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan TPT 	Dana Keistimewaan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di DIY. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan.
6.	(AULIA, 2021) “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 – 2020”	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel independen Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran 	<ul style="list-style-type: none"> - Periode penelitian: 2017-2024 - Menggunakan metode penelitian regresi data panel - Menggunakan variabel independen DAIS, DAU, DAK, DBH, dan Investasi 	Pertumbuhan ekonomi dan Pengangguran di Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan di Sleman dan Kota Yogyakarta berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.
7.	(Noreen, 2020) “Analisis Pengaruh Faktor PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2018”	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel independen Tingkat Pengangguran 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metode penelitian regresi data panel - Menggunakan variabel independen DAIS, DAU, DAK, DBH, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
			- Periode penelitian: 2017-2024	
8.	(Fani & Hartono, 2025) “Pengaruh Inflasi dan Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2021”	- Menggunakan variabel independen Pengangguran Terbuka	- Periode penelitian: 2017-2024 - Menggunakan metode penelitian regresi data panel - Menggunakan variabel independen DAIS, DAU, DAK, DBH, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9.	(Shafiyah, 2025) “Determinasi Ketimpangan Pendapatan, Rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”	- Menggunakan variabel independen Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi (PMDN)	- Periode penelitian: 2017-2024 - Menggunakan metode penelitian regresi data panel - Menggunakan variabel independen DAIS, DAU, DAK, DBH serta investasi (PMA)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan investasi dalam negeri (PMDN) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, hubungan antara dana transfer pemerintah dan kemiskinan menunjukkan hasil yang berbeda-beda, tergantung jenis dana dan bagaimana dana tersebut digunakan. Secara umum, dana transfer yang sifatnya khusus dan penggunaannya diarahkan untuk sektor tertentu cenderung lebih efektif dalam menurunkan kemiskinan dibandingkan dana yang penggunaannya lebih fleksibel.

Beberapa penelitian menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki kecenderungan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal ini karena DAK umumnya diarahkan untuk membiayai program-program prioritas, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar yang secara langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat miskin. Dengan demikian, peningkatan DAK dapat membantu memperbaiki akses layanan publik dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, hasil penelitian terkait Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan temuan yang lebih bervariasi. Dalam beberapa penelitian, DAU tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dapat terjadi karena DAU bersifat dana transfer umum yang penggunaannya lebih bebas, sehingga dalam praktiknya sering digunakan untuk belanja rutin pemerintah daerah, seperti gaji pegawai dan operasional. Kondisi tersebut membuat DAU tidak selalu memiliki dampak langsung terhadap penurunan kemiskinan. Berbeda dengan DAK dan DAU, variabel Dana Bagi Hasil (DBH) dalam beberapa studi justru ditemukan memiliki hubungan positif dengan kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan oleh ketimpangan penerimaan DBH antar daerah, serta kemungkinan bahwa DBH belum dimanfaatkan secara optimal untuk program yang benar-benar menasar kelompok miskin. Selain itu, DBH juga sering kali berkaitan dengan struktur ekonomi daerah tertentu, sehingga dampaknya terhadap kemiskinan bisa berbeda tergantung kondisi wilayah.

Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian mengenai Dana Keistimewaan (DAIS) masih relatif terbatas dibandingkan dana transfer lainnya. Salah satu penelitian yang meneliti topik ini adalah (Aini & Suharto, 2024) yang menyimpulkan bahwa Dana Keistimewaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan DAK berpengaruh negatif dan signifikan, serta DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di D.I. Yogyakarta. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh dana transfer terhadap kemiskinan tidak selalu sama untuk setiap jenis dana, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut dengan menambahkan variabel pendukung lainnya. Selain dana transfer, penelitian terdahulu juga banyak membahas faktor ekonomi yang dapat memengaruhi kemiskinan, seperti investasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka. Secara teori, investasi dan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menurunkan kemiskinan karena mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan membuka lapangan kerja. Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa investasi tidak selalu menurunkan kemiskinan, terutama jika investasi yang masuk bersifat padat modal, tidak merata antar wilayah, atau tidak menyerap tenaga kerja lokal.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka cenderung berhubungan positif dengan kemiskinan karena pengangguran menyebabkan pendapatan masyarakat menurun sehingga meningkatkan kerentanan ekonomi rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaruh dana transfer dan faktor ekonomi terhadap kemiskinan sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan dana, karakteristik wilayah, serta kondisi ekonomi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Dana Keistimewaan, DAU, DAK, DBH, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi D.I. Yogyakarta menggunakan pendekatan regresi data panel.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep dan Pengertian Kemiskinan

Menurut (Jacobus et al., 2018) kemiskinan (*poverty*) didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau kelompok yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya sendiri, terutama terkait konsumsi serta pendapatan yang rendah. Sedangkan, menurut (Badan Pusat Statistika, 2025) garis kemiskinan ini dapat diukur berdasarkan pada pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yang meliputi dua komponen utama, yaitu kebutuhan minimal makanan (*food poverty line*) dan kebutuhan minimal non-makanan diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, sandang, tempat tinggal dan kebutuhan dasar lainnya. Seseorang dapat dikatakan miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada dibawah nilai garis kemiskinan yang ditentukan pada suatu wilayah tersebut.

Berdasarkan data terbaru per September 2024, pemerintah menetapkan batas garis kemiskinan nasional diangka sekitar Rp. 595.242 hingga Rp. 609.160 per kapita per bulan. Ketentuan ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan siapa saja yang tergolong penduduk miskin di Indonesia. Dalam hal tersebut dapat diartikan bahwa seseorang yang secara finansial tidak mencapai angka Rp.595.000 per bulan maka dapat dikategorikan dalam kondisi miskin. Dengan demikian, mereka yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak diantaranya sandang, pangan, papan, pendidikan serta kesehatan. Batas garis kemiskinan ini penting karena menjadi indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat serta sebagai landasan bagi pemerintah dalam merancang dan menilai efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan di seluruh daerah di Indonesia. Dalam penelitian ini, kemiskinan diukur menggunakan

persentase penduduk miskin yang menunjukkan proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

2.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan hasil interaksi berbagai faktor ekonomi, sosial, dan struktural. Menurut (Kuncoro, 2003) kemiskinan berkaitan dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, peluang kerja, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dalam kerangka ekonomi pembangunan, penyebab kemiskinan dapat dikelompokkan ke dalam aspek kualitas sumber daya manusia, dinamika pasar tenaga kerja, performa perekonomian daerah, tingkat ketimpangan, serta kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik.

1. Pendidikan

Pendidikan memiliki peran sentral dalam menentukan tingkat kemiskinan karena berhubungan langsung dengan produktivitas dan akses terhadap pekerjaan. Dalam teori modal manusia (*human capital theory*), pendidikan dipandang sebagai investasi yang meningkatkan keterampilan dan kapasitas individu sehingga memperbesar peluang memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi, investasi di bidang pendidikan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memberikan imbal hasil berupa pendapatan yang lebih baik di masa mendatang (Todaro & Smith, 2015). Dalam praktik pembangunan, rendahnya tingkat pendidikan sering kali mendorong individu bekerja di sektor informal dengan penghasilan terbatas, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan.

2. Kesehatan

Selain pendidikan, aspek kesehatan juga merupakan komponen utama modal manusia yang berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan. (Todaro & Smith, 2015) menjelaskan bahwa kesehatan yang buruk dapat mengurangi produktivitas tenaga kerja sekaligus menambah beban ekonomi rumah tangga. Rumah tangga dengan kondisi ekonomi lemah umumnya memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan yang layak. Situasi ini dapat memperkuat kemiskinan jangka panjang karena menurunnya kemampuan bekerja serta meningkatnya pengeluaran untuk kebutuhan kesehatan.

3. Pengangguran dan Kesempatan Kerja

Akses terhadap pekerjaan menjadi faktor krusial dalam menentukan tingkat kemiskinan karena pendapatan utama rumah tangga bersumber dari aktivitas kerja. (Sukirno, 2007) menyatakan bahwa pengangguran terjadi ketika angkatan kerja tidak terserap dalam proses produksi, yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya pendapatan

dan menurunkan kesejahteraan. Secara konseptual, peningkatan tingkat pengangguran akan berdampak pada turunnya pendapatan rumah tangga dan bertambahnya jumlah penduduk miskin, sehingga hubungan antara pengangguran dan kemiskinan bersifat searah.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi suatu wilayah. Peningkatan pertumbuhan mencerminkan kemampuan daerah dalam memperluas pendapatan masyarakat dan menciptakan kesempatan kerja. Dalam teori pembangunan, pertumbuhan ekonomi berpotensi menurunkan kemiskinan apabila manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat (Arsyad & Lincoln, 2010). Namun, pertumbuhan tidak selalu berdampak langsung pada penurunan kemiskinan apabila hasilnya tidak terdistribusi secara merata dan hanya terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu. Kemiskinan dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan teori yang saling melengkapi. Teori-teori tersebut penting sebagai dasar untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan sekaligus mendukung pemilihan variabel penelitian (Todaro & Smith, 2015).

5. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan. (Kuznets & Simon, 1955) menyatakan bahwa ketimpangan dapat menyebabkan hasil pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin. Pada tahap awal pembangunan, transformasi struktural sering kali disertai dengan peningkatan ketimpangan, meskipun dalam jangka panjang ketimpangan dapat menurun. Oleh karena itu, wilayah dengan tingkat ketimpangan yang tinggi tetap berpotensi mengalami kemiskinan yang tinggi meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat.

6. Inflasi dan Harga Kebutuhan Pokok

Inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan melalui penurunan daya beli masyarakat. Rumah tangga miskin umumnya mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan dasar, terutama pangan (Sukirno, 2007). Kenaikan harga kebutuhan pokok akan mengurangi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan minimum, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin. Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat memperburuk kesejahteraan, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah.

7. Investasi dan Struktur Ekonomi

Investasi berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan, investasi dipandang sebagai faktor utama yang mendorong peningkatan output melalui pembentukan modal (Arsyad & Lincoln, 2010). Pada tingkat daerah, investasi dapat menurunkan kemiskinan apabila mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, dampaknya sangat bergantung pada karakteristik investasi tersebut. Investasi yang bersifat padat karya cenderung lebih efektif dalam menurunkan kemiskinan dibandingkan investasi padat modal yang relatif minim menyerap tenaga kerja.

8. Infrastruktur dan Akses Wilayah

Infrastruktur memengaruhi tingkat kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap pasar, pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi lainnya (Arsyad & Lincoln, 2010). Pembangunan infrastruktur dapat menurunkan biaya ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Daerah dengan keterbatasan infrastruktur umumnya menghadapi hambatan aktivitas ekonomi, tingginya biaya transportasi, serta terbatasnya akses terhadap layanan dasar. Kondisi ini meningkatkan risiko kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

9. Kebijakan Pemerintah dan Kapasitas Fiskal

Dalam perspektif ekonomi publik, pemerintah memiliki peran penting melalui penyediaan barang publik, pelayanan dasar, dan program perlindungan sosial. Pemerintah menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam perekonomian (Musgrave, 1959). Dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan layanan publik sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui transfer dari pemerintah pusat memungkinkan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program sosial yang berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan.

2.2.3 Teori-Teori Kemiskinan

1. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Teori lingkaran setan kemiskinan menjelaskan bahwa kemiskinan dapat terus berlangsung karena adanya hubungan yang saling memengaruhi. Pendapatan yang rendah menyebabkan kemampuan menabung menjadi kecil. Akibatnya, investasi juga rendah sehingga produktivitas tidak meningkat. Produktivitas yang rendah kembali menyebabkan pendapatan tetap rendah (Nurkse, 1953). Kondisi ini membentuk siklus yang membuat masyarakat sulit keluar dari kemiskinan. Untuk memutus siklus tersebut,

diperlukan campur tangan dari luar, seperti investasi, pembangunan infrastruktur, serta kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Teori Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural muncul akibat sistem ekonomi dan sosial yang membuat sebagian masyarakat tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya. Misalnya keterbatasan akses pendidikan, modal, pekerjaan, dan infrastruktur. Dalam konteks wilayah, perbedaan kondisi geografis dan pembangunan antar daerah juga dapat menyebabkan perbedaan tingkat kemiskinan. Teori ini relevan untuk menjelaskan perbedaan tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta karena tiap wilayah memiliki karakteristik ekonomi dan aksesibilitas yang berbeda.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah. Secara teori, pertumbuhan ekonomi dapat membantu menurunkan kemiskinan karena meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja (Todaro & Smith, 2015). Namun, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak langsung pada penurunan kemiskinan. Jika hasil pertumbuhan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu dan tidak menciptakan lapangan kerja yang luas, maka kemiskinan bisa tetap tinggi. Kondisi ini sering disebut sebagai pertumbuhan yang tidak inklusif.

4. Teori Peran Pemerintah dalam Mengurangi Kemiskinan

Dalam teori ini pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kegagalan pasar. Pemerintah dapat menekan angka kemiskinan melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, serta program pemberdayaan masyarakat. Belanja pemerintah yang tepat sasaran dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat memperlancar aktivitas ekonomi dan membuka akses terhadap kesempatan kerja.

5. Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan pembangunan. Pemerintah daerah dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat sehingga diharapkan mampu menyusun kebijakan yang lebih efektif (Oates, 1972). Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi, pemerintah pusat menyalurkan dana transfer seperti DAU, DAK, DBH, serta Dana Keistimewaan (khusus DIY). Secara teori, dana-dana tersebut dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah, memperbaiki pelayanan publik, serta

mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dampaknya terhadap kemiskinan sangat bergantung pada bagaimana dana tersebut dikelola.

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun kebijakan pemerintah. Secara umum, kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor Kebijakan Fiskal : kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik dan program sosial melalui anggaran daerah.
2. Faktor Ekonomi Daerah : investasi, pertumbuhan ekonomi, dan struktur perekonomian.
3. Faktor Ketenagakerjaan : tingkat pengangguran yang berhubungan dengan pendapatan masyarakat.

Dalam penelitian ini, faktor-faktor tersebut direpresentasikan melalui variabel Dana Keistimewaan (DAIS), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), investasi, pertumbuhan ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

2.2.4 Pengaruh Antar Variabel

2.2.4.1 Pengaruh Dana Istimewa (DAIS) Terhadap Kemiskinan

Pengalokasian Dana Keistimewaan (DAIS) pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan dan ketentraman masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dana ini merupakan bentuk dukungan dari pemerintah pusat yang diberikan secara khusus kepada DIY dalam rangka menjalankan kewenangan keistimewaannya, baik dalam aspek tata kelola pemerintahan, kebudayaan, maupun pembangunan daerah. Melalui berbagai program dan kegiatan yang dirancang secara terarah, DAIS menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan.

Pemanfaatan DAIS diwujudkan dalam berbagai sektor strategis, seperti peningkatan dan perbaikan infrastruktur, pengembangan layanan pendidikan dan kesehatan, pelestarian kebudayaan dan tradisi lokal, serta penguatan sektor ekonomi masyarakat. Peningkatan infrastruktur diharapkan dapat memperlancar mobilitas barang dan jasa, sehingga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas.

Di sisi lain, pelestarian kebudayaan dan tradisi lokal juga menjadi fokus penting dalam penggunaan DAIS, mengingat DIY memiliki nilai historis dan budaya yang kuat. Upaya ini tidak hanya menjaga identitas daerah, tetapi juga berpotensi meningkatkan sektor pariwisata yang dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, penguatan sektor ekonomi masyarakat dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan, seperti dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelatihan keterampilan, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.

Dengan adanya implementasi berbagai program tersebut, DAIS diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta menambah pendapatan rumah tangga. Peningkatan kondisi ekonomi ini pada akhirnya diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengalokasian DAIS yang tepat sasaran menjadi hal yang sangat penting agar tujuan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

2.2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan

Dana Alokasi Umum (DAU) berperan sebagai sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan publik dan pembangunan daerah. Melalui DAU pemerintah daerah dapat membiayai berbagai kegiatan seperti penyediaan fasilitas umum, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar yang secara tidak langsung memperkuat perekonomian lokal. Pemanfaatan DAU yang efektif diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

2.2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kemiskinan

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer dari APBN yang dialokasikan secara selektif kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus sesuai prioritas nasional dan urusan daerah. Melalui DAK, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran pada program-program spesifik seperti pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, peningkatan sarana kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan sektor prioritas yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Penggunaan DAK yang tepat sasaran diharapkan dapat mempercepat perbaikan layanan

dasar, mendorong investasi lokal, dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayah penerima.

2.2.4.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Kemiskinan

Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki peran yang penting dalam mendorong kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada konteks kemiskinan, DBH dapat menjadi salah satu faktor yang dapat memperkuat suatu daerah dalam membiayai program-program yang berpihak pada kelompok yang memiliki pendapatan rendah. Melalui DBH pemerintah daerah mendapatkan tambahan ruang fiskal untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta untuk mengembangkan suatu kegiatan ekonomi lokal yang produktif. Pemanfaatan dari DBH ini akan diarahkan pada program-program yang diharapkan mampu mendorong kativitas ekonomi seperti memperluas lapangan pekerjaan, mendorong aktivitas ekonomi, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Sehingga pada akhirnya kebijakan ini akan berkontribusi dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan di suatu daerah.

2.2.4.5 Pengaruh Investasi Terhadap Kemiskinan

Investasi berpotensi mempengaruhi tingkat kemiskinan karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperluas kesempatan kerja. Dalam konteks pembangunan wilayah, peningkatan pada investasi baik dari pemerintah maupun sektor swasta dapat berpengaruh pada kapasitas produksi dan mendorong aktivitas perekonomian. Perluasan aktivitas ini pada akhirnya menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta dapat menyerap tenaga kerja. Upaya ini diharapkan memiliki banyak manfaat bagi masyarkat serta dapat memperluas akses terhadap sumber pendapatan. Dengan meningkatnya pendapatan rumah tangga dan menurunnya kerentanan ekonomi, investasi diharapkan mampu berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan di suaatu daerah.

2.2.4.6 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan terutama pada peningkatan kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian suatu daerah. Ketika perekonomian tumbuh, aktivitas pada sektor produktif akan cenderung meningkat sehingga diharapkan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan

kenaikan pendapatan bagi masyarakat khususnya bagi kelompok yang memiliki pendapatan rendah.

Pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap berbagai sumber ekonomi baik melalui investasi, pengembangan sektor-sektor produktif maupun perbaikan pada infrastruktur pendukung. Dengan demikian, peningkatan output ekonomi tidak hanya memacu kenaikan pendapatan tetapi juga akan membantu mengurangi kerentangan ekonomi rumah tangga. Apabila pertumbuhan ekonomi berlangsung secara inklusif, maka akan berdampak pada kontribusi yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

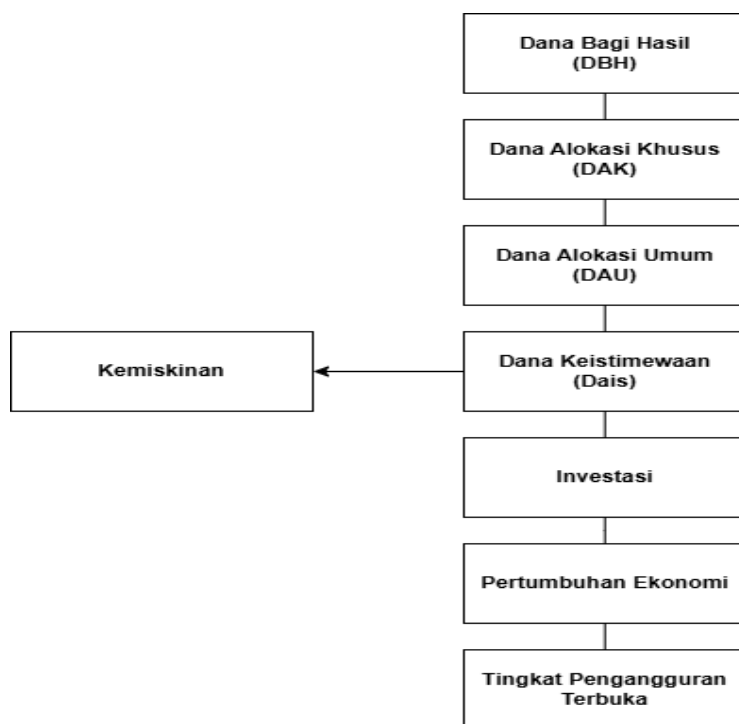
2.2.4.7 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan presentase penduduk dalam angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari kerja. Sementara itu, kemiskinan terjadi ketika pendapatan rumah tangga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga berada di bawah garis kemiskinan. Secara teoritis, pengangguran dapat meningkatkan kemiskinan karena hilangnya sumber pendapatan membuat rumah tangga semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. TPT yang tinggi juga menurunkan daya beli masyarakat dan melemahkan aktivitas ekonomi, sehingga kesempatan usaha maupun pekerjaan ikut menyempit. Kondisi tersebut dapat memperluas jumlah penduduk miskin.

Berbagai studi di Indonesia menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka cenderung memiliki hubungan positif dengan tingkat kemiskinan, walaupun besarnya pengaruh dapat berbeda antar wilayah dan waktu. Temuan ini menegaskan bahwa upaya menekan pengangguran khususnya lewat penyediaan lapangan kerja yang produktif dan layak merupakan langkah penting untuk menurunkan angka kemiskinan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada landasan teori serta hasil penelitian terdahulu, peneliti menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini merupakan dugaan awal yang masih perlu dibuktikan melalui analisis data. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, maka penulis merumuskan beberapa dugaan sebagai berikut:

1. Diduga Dana Keistimewaan (Dais) memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.
2. Diduga Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.
3. Diduga Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.
4. Diduga Dana Bagi Hasil (DBH) memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.
5. Diduga Investasi dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.
6. Diduga Pertumbuhan Ekonomi memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.
7. Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu gabungan antara data waktu (*time series*) dan data antar daerah (*cross-section*). Data dikumpulkan untuk lima daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten bantul, Kabupaten Kulon progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman selama tahun 2017-2024. Pada penelitian ini, data cross-section adalah data yang membandingkan kondisi antara lima daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun yang sama. Sementara itu, data time series adalah data yang mencatat perubahan tingkat kemiskinan, Dana Istimewa, DAU, DAK, DBH, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka selama periode 2017-2024. Sumber data yang digunakan dalam studi ini terdiri dari:

1. Data Kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta pada periode 2017-2024 yang diperoleh dari data dinamis persentase penduduk yang hidup dibawah kemiskinan dengan pendapatan per kapita per bulan sebesar Rp. 595.242 hingga Rp. 609.160 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) DIY dalam satuan persen.
2. Data Dana Keistimewaan (Dais) diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) D.I. Yogyakarta. Data ini mencakup 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta selama periode 2017-2024 dan disajikan dalam satuan juta rupiah.
3. Data Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) D.I. Yogyakarta. Data ini mencakup 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta selama periode 2017-2024 dan disajikan dalam satuan juta rupiah.
4. Data Dana Alokasi Khusus (DAK) diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) D.I. Yogyakarta. Data ini mencakup 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta selama periode 2017-2024 dan disajikan dalam satuan juta rupiah.
5. Data Bagi Hasil (DBH) diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) D.I. Yogyakarta. Data ini mencakup 5 Kabupaten/Kota

di Provinsi D.I. Yogyakarta selama periode 2017-2024 dan disajikan dalam satuan juta rupiah.

6. Data Investasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) D.I. Yogyakarta yang mencakup 5 Kabupaten/Kota selama periode 2017-2024 dan disajikan dalam satuan miliar rupiah.
7. Data pertumbuhan ekonomi diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) D.I. Yogyakarta. Data ini mencakup 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta selama periode 2017-2024 dan disajikan dalam satuan persen.
8. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) D.I. Yogyakarta. Data ini mencakup 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta selama periode 2017-2024 dan disajikan dalam satuan persen.

Dalam penelitian ini, beberapa variabel keuangan disesuaikan satuannya agar proses pengolahan dan intepretasi data menjadi lebih mudah. Dana Keistimewaan (DAIS) yang awalnya menggunakan satuan (Rp) diubah menjadi miliar dengan membagi seluruh nilai data dengan angka 1.000.000.000. Data Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang awalnya menggunakan satuan juta rupiah diubah ke satuan triliun rupiah dengan membagi seluruh nilai data dengan 1.000.000. Sementara itu, data investasi yang semula dinyatakan dalam miliar rupiah dikonversi ke triliun rupiah dengan membagi seluruh nilai data dengan 1.000. Penyesuaian satuan ini hanya bertujuan mengubah skala data dan tidak memengaruhi makna informasi data di dalamnya.

3.2 Definisi Opersional Variabel

3.2.1 Variabel Dependen

Kemiskinan adalah keadaan ketika penduduk belum mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan non-makanan. Dalam penelitian ini kemiskinan menjadi variabel dependen, yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain yang digunakan dalam penelitian. Kemiskinan ini diukur dengan persentase penduduk miskin di setiap wilayah dan tahun pengamatan. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Data kemiskinan diperoleh dari Badan

Pusat Statistik (BPS) dan dinyatakan dalam satuan persen. Nilai persentase yang semakin besar menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah semakin tinggi.

3.2.2 Variabel Independen

1. Dana Keistimewaan (Dais)

Dana Keistimewaan (Dais) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang memiliki status keistimewaan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan khusus daerah tersebut. Dalam penelitian ini Dana Keistimewaan (Dais) digunakan sebagai variabel independen, yaitu variabel yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan. Dana Keistimewaan (Dais) diukur berdasarkan realisasi Dais yang diterima oleh daerah pada setiap tahun pengamatan. Data Dana Keistimewaan diperoleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta dinyatakan dalam satuan juta rupiah. Nilai Dana Keistimewaan yang semakin besar menunjukkan semakin besarnya dana yang diterima daerah untuk mendukung pembangunan.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Dalam penelitian ini, DAU berfungsi sebagai variabel bebas yang diduga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. DAU ini diukur menggunakan realisasi Dana Alokasi Umum yang diterima daerah setiap tahunnya. Data DAU diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dinyatakan dalam satuan juta rupiah. Semakin besar DAU yang diterima menunjukkan semakin besar kapasitas fiskal daerah.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk membiayai kegiatan tertentu sesuai dengan prioritas nasional. Dalam penelitian ini, DAK digunakan sebagai variabel independen yang diduga mempengaruhi kemiskinan. DAK ini diukur menggunakan realisasi Dana Alokasi Khusus yang diterima daerah setiap tahunnya. Data DAK diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dinyatakan dalam satuan juta rupiah. Nilai DAK yang lebih besar menunjukkan meningkatnya dukungan pendanaan untuk kegiatan khusus di daerah.

4. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari penerimaan negara dan dibagikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu. Dalam penelitian ini, DBH digunakan sebagai variabel independen yang diduga berpengaruh terhadap kemiskinan. Data DAK diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dinyatakan dalam satuan

juta rupiah. Semakin besar DBH yang diterima daerah menunjukkan semakin besar penerimaan daerah dari sumber daya dan pajak.

5. Investasi

Investasi adalah kegiatan penanaman modal yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kegiatan ekonomi di suatu daerah. Dalam penelitian ini, investasi digunakan sebagai variabel bebas yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan. Data investasi diperoleh dari BPS DIY dan dinyatakan dalam persen. Nilai investasi yang semakin besar menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan peluang kerja di daerah.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai variabel independen yang diduga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Data diperoleh dari BPS DIY dan dinyatakan dalam satuan persen. Nilai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi menunjukkan kondisi perekonomian daerah yang semakin berkembang.

7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Dalam penelitian ini, TPT digunakan sebagai variabel bebas yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan. TPT diukur dengan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di masing-masing wilayah dan tahun pengamatan. Data TPT diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinyatakan dalam satuan persen. Nilai TPT yang semakin tinggi menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang belum memperoleh pekerjaan.

3.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan regresi data panel sebagai metode analisis. Data panel dipilih karena mampu menggabungkan data antar wilayah mampu menggabungkan data antar wilayah dan data antar waktu. Artinya, penelitian ini mengamati beberapa kabupaten/kota yang sama selama beberapa tahun sehingga dapat diketahui perubahan kondisi dari waktu ke waktu pada masing-masing wilayah.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan bantuan program *EViews* versi 13. Pada penelitian ini, model yang digunakan terbatas pada *Common Effect Model (CEM)* dan *Fixed Effect Model (FEM)* sebagai pembanding untuk menentukan model yang paling sesuai. Sementara itu *Random Effect Model (REM)* tidak digunakan karena jumlah

variabel independen lebih banyak dibandingkan jumlah unit cross-section (kabupaten/kota), sehingga model REM dan Uji Hausman tidak dapat dilakukan.

Model hubungan antara tingkat kemiskinan dan faktor-faktor yang memengaruhinya dalam penelitian ini dituliskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAIS_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DBH_{it} + \beta_5 INV_{it} + \beta_6 GROWTH_{it} + \beta_7 TPT_{it} + \mu_i + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

Y	: Kemiskinan (persen)
DAIS	: Dana Keistimewaan (juta rupiah)
DAU	: Dana Alokasi Umum (juta rupiah)
DAK	: Dana Alokasi Khusus (juta rupiah)
DBH	: Dana Bagi Hasil (juta rupiah)
INV	: Penanaman Modal Asing dan Lokal (persen)
GROWTH	: Pertumbuhan Ekonomi (persen)
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
$\beta_0 \beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5 \beta_6 \beta_7$: Koefisien Regesi Variabel Independen
i	: Kabupaten/Kota (Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman)
t	: Waktu (2017-2024)
e	: Standar Error
μ_i	: Efek Tetap Masing-Masing Daerah

3.3.1 Estimasi Regresi Data Panel

Dalam penelitian data panel, terdapat tiga pendekatan model estimasi yang umum digunakan, yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*. Pemilihan model terbaik umumnya dilakukan melalui serangkaian uji, yaitu uji Chow untuk membandingkan CEM dan FEM, uji Hausman untuk membandingkan FEM dan REM, serta uji *Lagrange Multiplier* untuk membandingkan CEM dan REM.

Namun, pada penelitian ini model *Random Effect* tidak dapat diestimasi secara teknis. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan jumlah unit *cross-section* (kabupaten/kota) yang relatif kecil dibandingkan dengan jumlah variabel independen yang digunakan dalam model. Kondisi ini menyebabkan proses estimasi REM tidak berjalan dan menghasilkan output yang tidak valid. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* sebagai model utama dalam analisis, karena model tersebut dapat diestimasi secara baik dan mampu mengontrol heterogenitas karakteristik antar kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.3.1.1 Common Effect

Model Common Effect (CEM) merupakan pendekatan paling sederhana dalam analisis data panel. Model ini mengasumsikan bahwa karakteristik setiap unit observasi bersifat sama, sehingga tidak ada perbedaan antar individu maupun antar waktu. Dengan kata lain, semua data dianggap memiliki perilaku yang seragam, baik dari sisi konstanta maupun koefisien regresinya. Estimasi pada model ini biasanya dilakukan menggunakan metode *Ordinary Least Squares (OLS)*. Karena sifatnya yang sederhana dan tidak mempertimbangkan perbedaan individu, model *Common Effect* sering dijadikan sebagai model dasar untuk dibandingkan dengan pendekatan lain yang lebih kompleks, seperti *Fixed Effect*.

3.3.1.2 Fixed Effect

Model *Fixed Effect (FEM)* digunakan ketika diasumsikan bahwa setiap unit observasi memiliki karakteristik khusus yang tidak berubah sepanjang waktu dan dapat memengaruhi variabel dependen. Dalam model ini, perbedaan antar individu ditangkap melalui perbedaan nilai konstanta (intercept), sedangkan koefisien variabel bebas dianggap tetap untuk seluruh unit dan periode waktu. Dengan memasukkan efek tetap tersebut, model *Fixed Effect* mampu mengendalikan faktor-faktor yang tidak teramati namun bersifat konstan, sehingga estimasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menjadi lebih akurat. Pendekatan ini umumnya diestimasi menggunakan metode kuadrat terkecil dengan bantuan variabel dummy untuk mewakili setiap individu dalam data panel.

3.3.1.3 Pemilihan Model

Pada Pada penelitian ini, pemilihan model dilakukan dengan membandingkan *Common Effect Model (CEM)* dan *Fixed Effect Model (FEM)* melalui uji *Chow*. Penggunaan uji ini bertujuan untuk menilai apakah perbedaan karakteristik antar individu dalam data

panel cukup signifikan sehingga perlu dimasukkan ke dalam model melalui pendekatan *Fixed Effect*.

Namun demikian, dalam penelitian ini *Random Effect Model (REM)* tidak dapat diestimasi secara optimal karena jumlah variabel independen lebih banyak dibandingkan jumlah unit cross-section (kabupaten/kota). Oleh karena itu, pengujian pemilihan model hanya dapat dilakukan menggunakan uji *Chow*, sehingga uji *Hausman* dan uji *Lagrange Multiplier* tidak dapat diterapkan dalam penelitian ini. Dalam uji *Chow*, hipotesis yang digunakan adalah:

H₀: *Model Common Effect* lebih tepat digunakan.

H_a: *Model Fixed Effect* lebih tepat digunakan.

Penentuan model dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas *Chi-square* dengan tingkat signifikansi α . Jika nilai probabilitas *Chi-square* lebih besar dari α , maka H₀ diterima sehingga model yang digunakan adalah *Common Effect*. Sebaliknya, jika nilai probabilitas *Chi-square* lebih kecil dari α , maka H₀ ditolak dan model *Fixed Effect* dianggap lebih sesuai.

3.4 Uji Statistik

3.4.1 Uji F

Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel independen yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam konteks ini, uji F menguji apakah model regresi yang diestimasi layak atau tidak digunakan untuk menjelaskan variasi pada variabel dependen. Hipotesis dalam uji F dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₀: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, artinya seluruh variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

H_a: $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$, artinya seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.4.2 Uji Parsial T

Uji parsial t digunakan untuk menguji hipotesis nol dengan memanfaatkan data sampel, yaitu untuk melihat apakah suatu variabel independen benar-benar berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (p-value) dari masing-masing koefisien variabel independen dalam model regresi. Hipotesis dalam uji t dapat dituliskan sebagai berikut:

$H_0: \beta = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_0: \beta \neq 0$ atau disesuaikan dengan arah hipotesis ($\beta > 0$), artinya terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.4.3 Koefisien Determinasi (R-Squared)

Koefisien determinasi (*R-squared*) digunakan untuk melihat seberapa baik model regresi mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Nilai *R-squared* menunjukkan proporsi perubahan variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel-variabel independen yang digunakan dalam model. Secara teoritis, jika semua titik data tepat berada pada garis regresi (residu sama dengan nol), maka garis regresi tersebut dikatakan menjelaskan data secara sempurna. Dalam praktiknya, kondisi seperti itu hampir tidak pernah terjadi karena nilai residu umumnya ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Oleh karena itu, yang diharapkan adalah nilai *R-squared* yang cukup besar sehingga dapat dikatakan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variasi variabel dependen, meskipun tidak sempurna.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kemiskinan yang diukur melalui persentase penduduk miskin di setiap kabupaten/kota di wilayah D.I. Yogyakarta. Sementara itu, Dana Istimewaan ditetapkan sebagai variabel independen utama dengan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai variabel bebas pendukung. Seluruh variabel tersebut merepresentasikan sumber pendaan dan aktivitas ekonomi pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan dana serta peningkatan kinerja ekonomi diharapkan variabel-variabel tersebut dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode data panel sehingga pengamatan dapat dilakukan pada beberapa wilayah dan beberapa periode waktu sekaligus. Metode ini membantu melihat bagaimana kondisi suatu daerah berubah dari waktu ke waktu sekaligus membandingkan perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Proses pengolahan dan analisis data ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Eviews versi 13 sehingga hasil estimasi yang dihasilkan diharapkan menghasilkan estimasi yang lebih tepat dan valid secara ilmiah.

4.2 Statistik Deskriptif

Tabel 4. 1 Analisis Deskriptif

	POVERTY	DAIS	DAU	DAK	DBH	INVEST	GROWTH	TPT
Mean	12,39600	59,00625	0,83275	0,27400	0,04475	4,48000	4,70550	3,83775
Median	13,17500	49,63000	0,90500	0,29000	0,03000	1,20000	5,16000	3,70000
Maximum	20,03000	272,53000	1,05000	0,44000	0,42000	51,60000	13,49000	9,16000
Minimum	6,26000	7,36000	0,38000	0,00000	0,00000	0,10000	-4,05000	1,49000
Std. Dev.	4,51522	47,92322	0,16333	0,10360	0,06337	8,52439	3,19756	1,87975
Observation	40	40	40	40	40	40	40	40

Tabel 4.1 secara umum memberikan gambaran awal mengenai kondisi kemiskinan serta variabel-variabel yang diduga memengaruhinya di lima kabupaten/kota di Provinsi DIY selama periode 2017–2024. Melalui tabel ini dapat dilihat nilai rata-rata,

penyebaran data, serta nilai tertinggi dan terendah dari masing-masing variabel sebelum dilakukan analisis regresi lebih lanjut.

Tingkat kemiskinan memiliki rata-rata sekitar 12,40 persen dengan nilai median sebesar 13,18 persen. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode pengamatan, secara umum lebih dari 10 persen penduduk di setiap daerah masih berada di bawah garis kemiskinan. Nilai terendah sebesar 6,26 persen mencerminkan kondisi kemiskinan paling rendah pada daerah dan tahun tertentu, sedangkan nilai tertinggi mencapai 20,03 persen yang menunjukkan tingkat kemiskinan paling tinggi. Deviasi standar sebesar 4,52 mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan antar daerah dan tahun cukup beragam.

Dana Keistimewaan memiliki nilai rata-rata sekitar 59,01 dengan median 49,63. Perbedaan antara nilai rata-rata dan median yang tidak terlalu besar menunjukkan sebaran data yang relatif seimbang, meskipun terdapat beberapa nilai yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari nilai maksimum sebesar 272,53 dan nilai minimum hanya 7,36. Deviasi standar yang cukup besar, yaitu sekitar 47,92, menunjukkan bahwa besaran DAIS sangat bervariasi antar daerah dan tahun.

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki rata-rata sekitar 0,83 dan median 0,91, dengan nilai minimum 0,38 serta maksimum 1,05. Deviasi standar yang relatif kecil, yaitu sekitar 0,16, menunjukkan bahwa sebaran DAU antar daerah cenderung lebih merata dibandingkan DAIS.

Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki rata-rata sebesar 0,27 dan median 0,29, dengan nilai minimum 0,00 dan maksimum 0,44. Adanya nilai minimum nol menunjukkan bahwa pada beberapa daerah atau tahun tertentu tidak terdapat alokasi DAK dalam skala yang digunakan, sementara daerah lainnya memperoleh alokasi yang cukup besar.

Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki rata-rata sekitar 0,04 dengan median 0,03. Meskipun sebagian besar daerah menerima DBH dalam jumlah kecil, terdapat nilai maksimum hingga 0,42. Deviasi standar sebesar 0,06 yang relatif besar dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa penerimaan DBH antar daerah dan tahun sangat tidak merata.

Variabel investasi memiliki rata-rata sekitar 4,48, namun median hanya sebesar 1,20. Nilai minimum tercatat sebesar 0,10 dan maksimum mencapai 51,60. Perbedaan yang cukup jauh antara nilai rata-rata dan median menunjukkan adanya beberapa nilai investasi yang sangat tinggi pada periode tertentu. Hal ini juga tercermin dari deviasi

standar yang besar, yaitu sekitar 8,52, yang menandakan bahwa nilai investasi sangat berfluktuasi antar daerah dan tahun.

Pertumbuhan ekonomi rata-rata berada di kisaran 4,71 persen dengan median 5,16 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum perekonomian daerah di DIY tumbuh positif di sekitar 5 persen per tahun. Namun, terdapat variasi yang cukup besar, terlihat dari nilai minimum sebesar -4,05 persen dan nilai maksimum mencapai 13,49 persen. Deviasi standar sekitar 3,20 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi antar tahun dan daerah cukup berfluktuasi, kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi tertentu seperti pandemi.

Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki rata-rata sebesar 3,84 persen dengan median 3,70 persen. Artinya, secara umum sekitar 3–4 persen angkatan kerja di masing-masing daerah berada dalam kondisi tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan. Nilai minimum sebesar 1,49 persen menunjukkan kondisi pengangguran terendah, sedangkan nilai maksimum mencapai 9,16 persen yang mencerminkan peningkatan pengangguran yang cukup tinggi pada periode tertentu. Deviasi standar sekitar 1,88 menandakan bahwa tingkat pengangguran antar daerah dan tahun juga menunjukkan variasi yang cukup besar.

4.3 Hasil Analisis dan Pembahasan

4.3.1 Estimasi Regresi Data Panel

Metode estimasi data panel dilakukan melalui 2 pendekatan yaitu Common Effect dan Fixed Effect

Tabel 4. 2 Common Effect

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
POVERTY	30,41834	3,050081	9,972963	0,0000
DAIS	0,001025	0,008485	0,120793	0,9046
DAU	-10,95428	3,162558	-3,463741	0,0015
DAK	2,765894	6,544052	0,422658	0,6754
DBH	1,635727	12,31642	0,132809	0,8952
INVEST	0,016265	0,049851	0,326264	0,7463
GROWTH	-0,236807	0,129929	-1,822590	0,0777
TPT	-2,285703	0,270617	-8,446276	0,0000
R-squared	0,770425			
Adjusted R-squared	0,720205			
F-statistic	15,34114			

Prob(F-statistic)	0,000000
-------------------	----------

Tabel 4. 3 Fixed Effect

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
POVERTY	14,79618	0,830855	17,90839	0,0000
DAIS	-0,006686	0,001171	-5,711215	0,0000
DAU	-0,145176	0,929771	-0,156141	0,8770
DAK	-9,144332	1,084044	-8,435387	0,0000
DBH	10,50307	2,524279	4,160819	0,0003
INVEST	0,022130	0,006004	3,685636	0,0010
GROWTH	-0,002514	0,020054	-0,125353	0,9011
TPT	0,053866	0,029708	1,813189	0,0805
R-squared	0,997945			
Adjusted R-squared	0,997137			
F-statistic	1235,991			
Prob(F-statistic)	0,000000			

4.3.2 Pemilihan Model Regresi

Dalam analisis data panel, terdapat tiga pendekatan model yang umum digunakan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Untuk menentukan model yang paling sesuai, biasanya dilakukan beberapa pengujian, yaitu uji Chow untuk membandingkan CEM dan FEM, uji Hausman untuk membandingkan FEM dan REM, serta uji Lagrange Multiplier (LM) untuk membandingkan CEM dan REM. Namun, pada penelitian ini model Random Effect tidak dapat diestimasi secara teknis. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dimensi data panel, yaitu jumlah unit cross-section (kabupaten/kota) yang relatif lebih kecil dibandingkan jumlah variabel yang digunakan dalam model. Kondisi tersebut menyebabkan proses estimasi REM tidak dapat dijalankan dan menghasilkan output yang tidak valid. Oleh karena itu, pemilihan model dalam penelitian ini difokuskan pada perbandingan antara model Common Effect dan Fixed Effect melalui uji Chow, dan analisis selanjutnya menggunakan model Fixed Effect. Uji Hausman tidak dapat dilakukan karena model Random Effect tidak dapat diestimasi pada data penelitian ini.

4.3.2.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang paling tepat antara Common Effect dan Fixed Effect. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Model Common Effect lebih tepat digunakan.

H_a : Model Fixed Effect lebih tepat digunakan.

Pemilihan model dilakukan dengan melihat nilai p-value dari hasil uji Chow. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka hasil uji dinyatakan signifikan dan model yang dipilih adalah *Fixed Effect*. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 5\%$, maka hasil uji tidak signifikan sehingga model yang digunakan adalah *Common Effect*.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	69,520176	(4,28)	0,000
Cross-section Chi-square	95,665772	4	0,000

Berdasarkan hasil estimasi yang ditunjukkan pada Tabel 4.3, diperoleh nilai statistik Chi-Square sebesar 95,665772 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5$ persen, sehingga hipotesis nol H_0 ditolak dan hasil uji dinyatakan signifikan. Oleh karena itu, berdasarkan uji Chow dapat disimpulkan bahwa model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

4.4 Model Regresi Terbaik

Pada penelitian ini pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji chow untuk membandingkan *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas statistik F dan *Chi-Square* sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini menyebabkan hipotesis nol yang menyatakan bahwa model Common Effect sudah memadai ditolak. Oleh karena itu, berdasarkan uji Chow dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat dan digunakan sebagai model terbaik dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

4.4.1 Uji Statistik

Analisis uji statistik pada penelitian ini menggunakan beberapa uji statistik yaitu uji F untuk menilai pengaruh variabel secara bersama-sama, uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara individu serta koefisien determinasi (R-squared) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan.

4.4.1.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan (Uji F) adalah uji yang digunakan untuk menganalisis pada variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Pada uji F ini regresi data panel menilai apakah model layak secara keseluruhan, tidak hanya satu per satu variabel. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = 0$, yang berarti secara simultan variabel-variabel independen di dalam model tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_j \neq 0$ ($j = 1, \dots, 7$), sehingga secara bersama-sama variabel independen dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil estimasi pada model Fixed Effect, nilai F-statistic sebesar 1235,991 dengan probabilitas 0,0000 yang dimana itu lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Keistimewaan, DAU, DAK, DBH, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.

4.4.1.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji T digunakan untuk melihat apakah setiap variabel independen dalam model memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan. Penilaian yang dilakukan adalah dengan membandingkan nilai probabilitas t-statistic (Prob.) masing-masing tiap variabel dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka variabel tersebut dinyatakan berpengaruh secara signifikan. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas $\geq 0,05$, maka variabel tersebut dianggap tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

4.4.1.2.1 Variabel Dana Keistimewaan (DAIS)

Berdasarkan hasil estimasi pada model Fixed Effect, variabel Dana Keistimewaan (DAIS) memiliki koefisien sebesar $-0,006686$ dengan nilai probabilitas 0,0000 yang

berada di bawah tingkat signifikansi ($<5\%$). Hasil ini menunjukkan bahwa Dana Keistimewaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di lima kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.

4.4.1.2.2 Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan hasil estimasi, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki koefisien sebesar $-0,145176$ dengan nilai probabilitas $0,8770$. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi ($>5\%$), sehingga secara statistik DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan demikian, dalam model yang digunakan, DAU belum menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap perubahan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi D.I. Yogyakarta selama periode penelitian yaitu 2017 sampai 2024.

4.4.1.2.3 Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki koefisien sebesar $-9,144332$ dengan nilai probabilitas $0,0000$ yang dimana hal itu lebih kecil dari tingkat signifikansi ($<5\%$). Hal ini menunjukkan bahwa DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kesimpulannya DAK terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan dalam model penelitian ini.

4.4.1.2.4 Variabel Dana Bagi Hasil (DBH)

Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki koefisien sebesar $10,50307$ dengan nilai probabilitas $0,0003$. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi ($<5\%$), sehingga DBH dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara DBH dan tingkat kemiskinan selama periode pengamatan.

4.4.1.2.5 Variabel Investasi (INV)

Berdasarkan hasil estimasi, variabel investasi memiliki koefisien sebesar $0,022130$ dengan nilai probabilitas $0,0010$, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi ($<5\%$). Dengan demikian, investasi dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

4.4.1.2.6 Variabel Pertumbuhan Ekonomi (GROWTH)

Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien sebesar $-0,002514$ dengan nilai probabilitas $0,9011$ yang memiliki tingkat signifikansi jauh lebih besar dari pada 5% ,

sehingga pertumbuhan ekonomi dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

4.4.1.2.7 Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki koefisien sebesar 0,053866 dengan nilai probabilitas 0,0805. Nilai tersebut menunjukkan bahwa TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan tingkat pengangguran terbuka cenderung diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.4.1.2.8 Koefisien Determinasi (R-Squared)

Berdasarkan hasil estimasi model Fixed Effect yang ditunjukkan pada Tabel 4.4, diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,997945. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebesar 99,79% variasi tingkat kemiskinan di lima kabupaten/kota Provinsi D.I. Yogyakarta selama periode penelitian dapat dijelaskan oleh variasi variabel Dana Keistimewaan (DAIS), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Investasi, Pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka yang digunakan dalam model. Sementara itu, sebesar 0,21% variasi tingkat kemiskinan lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.4.2 Pembahasan

4.4.2.1 Pengaruh Dana Keistimewaan (DAIS) terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi, variabel Dana Keistimewaan (DAIS) memiliki koefisien sebesar -0,006686 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Hal ini menunjukkan bahwa DAIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan kata lain, peningkatan DAIS cenderung menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DAIS sejalan dengan hipotesis. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan penggunaan DAIS sebesar Rp. 1 juta akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,0007 persen. Dengan kata lain, jika penggunaan DAIS meningkat sebesar Rp. 1 miliar, maka tingkat kemiskinan diperkirakan menurun sebesar 0,07 persen. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diharapkan, hasil penelitian ini sejalan dengan (Pangestu, 2022) yang menemukan bahwa Dana Keistimewaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DIY. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian (Farida, 2019) yang menyatakan bahwa Dana Keistimewaan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu, hasil penelitian ini juga berbeda dengan penelitian (Aini & Suharto, 2024) serta (Riskha & Haribowo, 2021) yang menyimpulkan bahwa Dana Keistimewaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di DIY.

Pengaruh negatif DAIS terhadap kemiskinan dapat dijelaskan melalui beberapa hal. Pertama, alokasi dana pada sektor kebudayaan dan pariwisata dapat mendorong perkembangan ekonomi lokal, terutama melalui peningkatan aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif yang mampu membuka lapangan kerja. Kedua, penguatan kelembagaan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga program-program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Ketiga, pengelolaan tata ruang dan pertanahan yang lebih baik dapat mendukung peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi di daerah.

Selain itu, Dana Keistimewaan juga berperan dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang baik dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan mobilitas tenaga kerja, serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Kondisi ini pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik dan berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Keistimewaan yang efektif mampu mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun tidak secara langsung ditujukan untuk mengatasi kemiskinan, pemanfaatan dana ini tetap memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.4.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki koefisien sebesar $-0,145176$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,8770$. Koefisien negatif menunjukkan bahwa DAU memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan, namun nilai probabilitas yang lebih besar dari $0,05$ maupun $0,10$ menunjukkan bahwa pengaruh DAU tidak signifikan secara statistik. Hal ini berarti bahwa meskipun arah hubungan sesuai dengan hipotesis, variabel DAU belum terbukti memiliki pengaruh yang nyata terhadap tingkat kemiskinan.

DAU merupakan dana transfer yang bersifat umum, sehingga penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun, hal ini sering kali

menyebabkan DAU lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan administratif pemerintahan.

Tidak signifikannya pengaruh DAU terhadap kemiskinan bisa disebabkan oleh terlalu banyaknya penggunaan dana ini untuk belanja rutin seperti gaji pegawai, operasional kantor, dan kegiatan pemerintah daerah lainnya dari pada untuk usaha pengentasan jumlah kemiskinan. Memang pada dasarnya alokasi tersebut digunakan keberlangsungan operasional pemerintahan daerah, sehingga dana ini tidak benar-benar langsung diarahkan pada program yang menysasar masyarakat miskin. Oleh karena itu, kontribusi DAU terhadap penurunan tingkat kemiskinan cenderung terbatas. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Aini & Suharto, 2024) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DIY. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan (Farida, 2019) serta (Riskha & Haribowo, 2021) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

4.4.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi, Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki koefisien sebesar -9,144332 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Hasil ini menunjukkan bahwa DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan kata lain, peningkatan DAK cenderung menurunkan tingkat kemiskinan. Artinya jika DAK meningkat Rp. 1 triliun diperkirakan akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 9,144332 persen. Dengan kata lain, peningkatan DAK sebesar Rp. 1 miliar diperkirakan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,0091 persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Aini & Suharto, 2024) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DIY. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Farida, 2019) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu, penelitian ini juga berbeda dengan (Riskha & Haribowo, 2021) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di DIY. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi DAK di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pengaruh untuk menurunkan angka kemiskinan. DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk membiayai kegiatan khusus daerah, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana publik. Dengan adanya dana ini, pemerintah

daerah memiliki kemampuan lebih besar untuk memperbaiki kualitas layanan dasar masyarakat.

Pengaruh negatif pada hasil olah data menjelaskan bahwa DAK memiliki manfaat diantaranya adalah pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi. Peningkatan pada akses pendidikan ini dapat mendorong perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan pada layanan kesehatan akan membantu masyarakat tetap memiliki kesehatan yang baik sehingga akan menjaga produktivitas kerja. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur akan memperlancar aktivitas ekonomi dan distribusi hasil produksi masyarakat. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan penduduk dan menurunkan risiko masyarakat bangkit dari garis kemiskinan.

Selain itu dengan adanya DAK di Daerah Istimewa Yogyakarta akan mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah, karena pada wilayah yang sebelumnya tertinggal dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki fasilitas publiknya sehingga masyarakat tersebut dapat merasakan fasilitas yang setara dengan wilayah lain. Dengan adanya pemerataan pembangunan ini maka akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan dana DAK menjadi salah satu faktor yang mendukung strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan.

4.4.2.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki koefisien sebesar 10,50307 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0003. Hasil ini menunjukkan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya, peningkatan DBH justru diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan DBH di Daerah Istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya efektif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Aini & Suharto, 2024) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa dana transfer dari pusat termasuk DBH, serta tidak sesuai dengan hipotesis awal yang mengharapkan adanya pengaruh negatif, di mana DBH seharusnya mampu menurunkan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas fiskal. Oleh karena itu, pengaruh positif DBH terhadap kemiskinan dapat mengindikasikan bahwa pemanfaatan DBH belum sepenuhnya diarahkan pada program-program yang secara langsung menasabah masyarakat miskin.

Secara teori, DBH memang seharusnya dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam pembiayaan pembangunan ekonomi. Namun, jika pengelolaannya belum sepenuhnya diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat, maka dana ini tidak akan memberikan dampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan. Selain itu, kemungkinan adanya ketimpangan distribusi manfaat pembangunan juga dapat menyebabkan hasil DBH lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu, sehingga masyarakat miskin belum merasakan manfaatnya secara optimal.

Di sisi lain, peningkatan DBH juga dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus pada sektor-sektor penghasil pendapatan, sementara program sosial yang menasar masyarakat miskin kurang mendapat prioritas. Kondisi ini yang menyebabkan DBH belum mampu berfungsi dalam mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih efektif dalam mengarahkan penggunaan DBH agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas.

4.4.2.5 Pengaruh Investasi terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi, variabel investasi memiliki koefisien sebesar 0,022130 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0010. Hasil ini menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya, peningkatan investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta belum secara langsung menurunkan angka kemiskinan, bahkan cenderung diikuti oleh peningkatan kemiskinan. Temuan ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa investasi seharusnya berperan dalam mengurangi kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa investasi yang masuk ke daerah belum sepenuhnya mendukung penciptaan kesejahteraan masyarakat miskin. Investasi dalam penelitian ini mencakup penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Jika dibandingkan dengan penelitian (Shafiyah, 2025) terdapat perbedaan dalam pengukuran variabel investasi. Penelitian tersebut hanya menggunakan PMDN sebagai indikator investasi dan memperoleh hasil bahwa PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, penelitian ini menggunakan total investasi (PMDN dan PMA), sehingga cakupan analisisnya lebih luas. Perbedaan ini memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian yang diperoleh.

Secara teori, investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, sehingga dapat

membantu menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi justru diikuti dengan peningkatan kemiskinan. Hal ini dapat terjadi karena investasi yang masuk cenderung bersifat padat modal dibandingkan padat karya. Investasi jenis ini lebih banyak menggunakan teknologi dan mesin daripada tenaga kerja manusia, sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi terbatas. Oleh karena itu, peningkatan investasi ini tidak diikuti dengan peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, khususnya kelompok berpendidikan rendah yang rentan terhadap kemiskinan

Selain itu, masuknya investasi juga berpotensi meningkatkan kesenjangan pendapatan jika manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal dan tenaga kerja yang sudah memiliki keahlian. Masyarakat miskin yang tidak memiliki keterampilan memadai cenderung tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi baru yang ada. Oleh karena itu, agar investasi dapat berperan dalam menurunkan kemiskinan, diperlukan kebijakan yang mendorong investasi padat karya serta program peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal.

4.4.2.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (Growth) terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien sebesar $-0,002514$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,9011$. Koefisien negatif menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan, namun nilai probabilitas yang sangat besar menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi tidak signifikan secara statistik sehingga tidak sejalan dengan hipotesis yang ada. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya menyeluruh dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di DIY. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Shafiyah, 2025) dan (AULIA, 2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Temuan ini tidak sesuai dengan hipotesis awal, dimana tidak signifikannya pengaruh pertumbuhan ekonomi dapat disebabkan oleh distribusi hasil pembangunan yang belum merata. Terjadi ketimpangan antara kelompok masyarakat tertentu yang menikmati peningkatan pendapatan lebih besar dengan kelompok miskin belum merasakan dampak positif pertumbuhan secara langsung. Akibatnya, meskipun perekonomian daerah tumbuh, angka kemiskinan tidak banyak mengalami perubahan.

Selain itu, struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor-sektor tertentu juga dapat menyebabkan lapangan kerja yang terbatas. Jika sektor yang tumbuh tidak menyerap banyak tenaga kerja, maka dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan

menjadi kecil. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang bersifat padat karya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat miskin.

4.4.2.6 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Kemiskinan

Variabel tingkat pengangguran terbuka menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti bahwa peningkatan pengangguran yang diikuti oleh peningkatan angka kemiskinan. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian (AULIA, 2021) yang menunjukkan bahwa di beberapa kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Fani & Hartono, 2025) yang menyatakan bahwa pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain itu, hasil penelitian ini juga berbeda dengan penelitian (Noreen, 2020) yang menemukan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Pengaruh positif TPT terhadap kemiskinan dapat dijelaskan melalui keterkaitan antara pengangguran dan pendapatan masyarakat. Peningkatan jumlah pengangguran mencerminkan bertambahnya individu yang tidak memiliki sumber pendapatan tetap, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan kesempatan kerja masih menjadi permasalahan dalam upaya penurunan kemiskinan.

Namun demikian, karakteristik pasar kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta turut mempengaruhi hubungan tersebut. Sebagian pengangguran berasal dari lulusan baru yang masih berada dalam masa transisi mencari pekerjaan, sehingga meskipun secara statistik tergolong pengangguran terbuka, secara ekonomi belum tentu termasuk kelompok miskin karena masih memperoleh dukungan dari keluarga.

Selain itu, struktur perekonomian DIY yang didominasi oleh sektor informal, pariwisata, dan UMKM memungkinkan masyarakat tetap memperoleh pendapatan meskipun tidak bekerja secara formal. Hal ini menyebabkan hubungan antara pengangguran dan kemiskinan tidak selalu bersifat langsung. Meskipun demikian, secara keseluruhan TPT tetap terbukti memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.4.3 Analisis Intersep

Analisis intersep dalam regresi data panel adalah analisis yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan nilai dasar antar kabupaten/kota ketika seluruh variabel

independen dianggap berada pada kondisi yang sama atau tetap. Intersep menunjukkan tingkat awal variabel dependen, yaitu kemiskinan, pada saat variabel-variabel penjelas berada pada titik acuan model atau bernilai nol.

Tabel 4. 5 Cross Section Fixed Effect

No	Kabupaten/Kota	Effect	Coefficien	Intercept
1	Kota Yogyakarta	-6.739736	14,79618	8,056444
2	Kabupaten Bantul	1.127940	14,79618	15,92412
3	Kabupaten Kulon Progo	4.897452	14,79618	19,693632
4	Kabupaten Gunungkidul	5.216722	14,79618	20,012902
5	Kabupaten Sleman	-4.502378	14,79618	10,293802

Berdasarkan hasil estimasi model Fixed Effect pada Tabel 4.5, terlihat bahwa setiap kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki nilai intersep yang berbeda. Perbedaan nilai intersep ini mencerminkan adanya perbedaan tingkat kemiskinan dasar antar daerah, setelah pengaruh Dana Keistimewaan (DAIS), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), investasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka dikendalikan dalam model.

1. Kota Yogyakarta memiliki nilai intersep sebesar 8,056444. Nilai ini menunjukkan ketika variabel Dana Keistimewaan (DAIS), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bernilai nol, Kota Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan diperkirakan sebesar 8,06 persen. Angka ini merupakan yang paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi D.I. Yogyakarta.
2. Kabupaten Bantul memiliki nilai intersep sebesar 15,92412. Nilai ini menunjukkan ketika variabel Dana Keistimewaan (DAIS), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bernilai nol, Kabupaten Bantul memiliki tingkat kemiskinan diperkirakan sebesar 15,92 persen. Tingkat kemiskinan dasar ini lebih tinggi dibandingkan Kota Yogyakarta dan Sleman, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Kulon Progo dan Gunungkidul.
3. Nilai intersep Kabupaten Kulon Progo sebesar 19,693632. Nilai ini menunjukkan ketika variabel Dana Keistimewaan (DAIS), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Investasi, Pertumbuhan Ekonomi,

dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bernilai nol, Kabupaten Kulon Progo memiliki tingkat kemiskinan diperkirakan sebesar 19,69 persen. Angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo masih memiliki tingkat kemiskinan dasar yang relatif tinggi dibandingkan daerah lainnya.

4. Kabupaten Gunungkidul memiliki nilai intersep sebesar 20,012902 dan merupakan yang tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota. Nilai ini menunjukkan bahwa ketika variabel Dana Keistimewaan (DAIS), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bernilai nol, Kabupaten Gunungkidul memiliki tingkat kemiskinan diperkirakan sebesar 20,01 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat karakteristik tetap di Gunungkidul yang menyebabkan daerah ini cenderung memiliki tingkat kemiskinan dasar paling tinggi di Provinsi D.I. Yogyakarta.
5. Kabupaten Sleman memiliki nilai intersep sebesar 10,293902. Nilai ini menunjukkan ketika variabel Dana Keistimewaan (DAIS), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bernilai nol, Kabupaten Sleman memiliki tingkat kemiskinan diperkirakan sebesar 10,29 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa Sleman termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan dasar yang relatif rendah, hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Yogyakarta.

Secara umum, hasil analisis intersep menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kemiskinan dasar antar kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, meskipun pengaruh Dana Keistimewaan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Investasi, Pertumbuhan ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka bernilai nol. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan dasar yang relatif lebih rendah, sedangkan Kabupaten Kulon Progo dan terutama Kabupaten Gunungkidul masih menunjukkan tingkat kemiskinan dasar yang lebih tinggi.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh Dana Keistimewaan (DAIS), dana transfer dari pemerintah pusat yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta variabel ekonomi makro daerah seperti investasi, pertumbuhan ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama periode 2017–2024.

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model, diperoleh beberapa temuan utama sebagai berikut:

1. Dana Keistimewaan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan alokasi Dana Keistimewaan cenderung diikuti oleh penurunan angka kemiskinan di kabupaten/kota DIY. Temuan ini menunjukkan bahwa Dana Keistimewaan memiliki peran yang cukup efektif dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
2. Dana Alokasi Umum menunjukkan arah pengaruh negatif, namun secara statistik tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun peningkatan DAU berpotensi menekan kemiskinan, dalam periode penelitian pengaruh tersebut belum cukup kuat untuk dibuktikan secara empiris.
3. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil ini menandakan bahwa DAK relatif lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan, kemungkinan karena penggunaannya lebih terfokus pada sektor-sektor prioritas tertentu.
4. Dana Bagi Hasil justru menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan DBH berkorelasi dengan meningkatnya kemiskinan. Kondisi tersebut dapat mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan DBH atau kurang tepatnya alokasi dana tersebut dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan.
5. Variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang masuk selama periode penelitian belum mampu mendorong penurunan kemiskinan. Kemungkinan investasi

yang berkembang lebih terkonsentrasi pada sektor tertentu, kurang bersifat padat karya, atau belum menjangkau kelompok masyarakat miskin.

6. Pertumbuhan Ekonomi memiliki arah pengaruh negatif namun tidak signifikan. Artinya, meskipun secara teori pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan kemiskinan, dalam konteks DIY selama periode penelitian dampaknya belum terasa secara nyata atau belum merata di seluruh lapisan masyarakat.
7. Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Secara arah hubungan, peningkatan pengangguran cenderung mendorong kenaikan kemiskinan, namun pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik dalam penelitian ini.

Secara umum, hasil penelitian memperlihatkan bahwa instrumen fiskal daerah, khususnya Dana Keistimewaan dan Dana Alokasi Khusus, memiliki kontribusi yang lebih besar dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan dibandingkan dengan indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil analisis, terdapat sejumlah implikasi kebijakan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

1. Implikasi terhadap Kebijakan Dana Keistimewaan

Pengaruh negatif dan signifikan Dana Keistimewaan terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa dana tersebut dapat berfungsi sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam mendukung penanggulangan kemiskinan di DIY. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pengelolaan dan penyaluran Dana Keistimewaan tetap diarahkan pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

2. Implikasi terhadap Kebijakan Dana Transfer Pusat

Efektivitas Dana Alokasi Khusus dalam menurunkan kemiskinan menegaskan pentingnya skema transfer yang bersifat spesifik dan berbasis kebutuhan sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan layanan publik. Sebaliknya, tidak signifikannya pengaruh DAU menunjukkan bahwa dana yang bersifat umum memerlukan perencanaan dan penganggaran yang lebih terarah agar mampu berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.

Sementara itu, temuan terkait DBH yang berpengaruh positif terhadap kemiskinan mengisyaratkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perencanaan dan penggunaannya. Perlu dipastikan bahwa DBH dialokasikan pada program yang memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar untuk pembiayaan rutin yang kurang produktif.

3. Implikasi terhadap Kebijakan Investasi Daerah

Hubungan positif antara investasi dan kemiskinan mengindikasikan bahwa investasi yang berkembang belum sepenuhnya inklusif. Pemerintah daerah perlu mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja, khususnya di sektor padat karya dan UMKM, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

4. Implikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Tidak signifikannya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa peningkatan PDRB belum otomatis berdampak pada penurunan kemiskinan. Hal ini menegaskan pentingnya strategi pertumbuhan yang inklusif, yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan melalui penciptaan lapangan kerja produktif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

5.3 Saran

1. Saran bagi Pemerintah Daerah DIY

Pemerintah daerah perlu mempertahankan serta meningkatkan kualitas pemanfaatan Dana Keistimewaan dengan fokus pada program-program yang secara langsung menysasar masyarakat miskin, seperti pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi desa, dan bantuan sosial produktif.

Optimalisasi penggunaan DAK perlu terus dilakukan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan.

Evaluasi terhadap pemanfaatan DBH perlu diperkuat melalui sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif agar alokasi dana tersebut benar-benar mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

Pemerintah daerah perlu menciptakan iklim investasi yang lebih inklusif dengan memberikan insentif bagi investasi padat karya serta mendorong keterlibatan tenaga kerja lokal dan UMKM dalam rantai produksi.

2. Saran bagi Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat dapat mempertimbangkan penguatan skema transfer yang bersifat spesifik seperti DAK, mengingat efektivitasnya dalam menurunkan kemiskinan. Sementara itu, pengawasan terhadap penggunaan DBH perlu ditingkatkan agar dana tersebut dapat diarahkan pada program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

3. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian berikutnya disarankan untuk memasukkan variabel tambahan yang relevan, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), belanja sosial, tingkat pendidikan, ketimpangan pendapatan, serta inflasi, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Penggunaan metode estimasi alternatif, seperti model dinamis, atau perluasan cakupan wilayah penelitian dapat dilakukan untuk meningkatkan kekuatan generalisasi hasil.

Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas Dana Keistimewaan berdasarkan sektor atau program tertentu, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih spesifik dan aplikatif.

Daftar Pustaka

- Aini, F. N., & Suharto. (2024). *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Analisis pengaruh dana keistimewaan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022*. 3(1), 24–32. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol3.iss1.art4>
- Aprilyada, G., Zidan, M. A., Nurlia, Ainunisa, R. A., & Winarti, W. (2023). *Peran Kajian Pustaka Dalam Penelitian Tindakan Kelas*. 1(2), 165–173.
- Arsyad, & Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan. Edisi 5*.
- AULIA, A. F. N. (2021). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 – 2020*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/38004>
- Badan Pusat Statistika. (2025a). *Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS*. <https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html>
- Badan Pusat Statistika. (2025b). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2518/persentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-8-47-persen-.html>
- Bapperida DIY. (2025). *Jogja Dataku, Data Keuangan*. https://bapperida.jogjaprov.go.id/dataku/data_keuangan/index/33-pengelolaan-aset#60
- BPS. (2025a). *Data Dinamis Badan Pusat Statistika DIY*. <https://yogyakarta.bps.go.id/id/query-builder>
- BPS. (2025b). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen), 2025*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>
- Busti, R. (2022). EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. <https://Repository.Metrouniv.Ac.Id/>.
- Fani, & Hartono, D. (2025). *Pengaruh Inflasi dan Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2021*. <https://pub.ruangrosadi.com/jurnal-ilmiah/index.php/jamfi/article/view/87>

- Faosi, N., & Halim, A. (2022). *Pengaruh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kemiskinan*. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/222358>
- Farida, V. N. (2019). *ANALISIS PENGARUH DANA KEISTIMEWAAN (DANAIS), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN MASYARAKAT DI DIY TAHUN 2014-2017*. <http://eprints.upnyk.ac.id/18211/>
- Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2018). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN RUMAH*. 19(7), 1–16.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-itu-dana-keistimewaan-diy>
- Kuncoro, M. (2003). *Ekonomi pembangunan: teori, masalah, dan kebijakan*.
- Kuznets, & Simon. (1955). *Economic Growth and Income Inequality*.
- Musgrave. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*.
- Nany, M. (2022). *PENGARUH PAD, DBH, DAU, DAK DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA TENGAH*. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/8274>
- Noreen, A. A. F. P. (2020). *Analisis Pengaruh Faktor PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2018*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/23557>
- Nurkse. (1953). *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*.
- Nurwati, N. (2008). *Kemiskinan : Model Pengukuran , Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 1–11.
- Oates. (1972). *Fiscal Federalism*.
- Pangestu, Y. A. G. (2022). *Analysis Performance of Tax Effort and Privilege Funds Influencing Economy of Special Region of Yogyakarta in 2014-2019*. *Journal of Economics and Policy*. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=MCt_I2MAAAAJ&citation_for_view=MCt_I2MAAAAJ:u-x6o8ySG0sC

- Pemerintah Kabupaten Bantul. (2023). *Rintisan Kalurahan Budaya, Lestarikan Budaya Adiluhung*.
<https://bantulkab.go.id/berita/detail/6165/rintisan-kalurahan-budaya--lestarikan-budaya-adiluhung.html>
- Riskha, Y., & Haribowo, K. (2021). *PENGARUH DANA KEISTIMEWAAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP ANGKA KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014-2019*.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/202517>
- Sekar Arum, H. F., Wijaya, S. R., & Abipraya, F. A. (2021). Pengaruh Dana Keistimewaan Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 6(1), 62–82. <https://doi.org/10.35706/jpi.v6i1.5329>
- Shafiyah, S. S. (2025). *Determinasi Ketimpangan Pendapatan, Rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. <https://repository.upnjatim.ac.id/37965/>
- Sukirno, S. (2007). *Makroekonomi Modern*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*.
- Undang-undang Nomor 11. (2006). *Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40174/uu-no-11-tahun-2006>
- Undang-Undang Nomor 13. (2012). *Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Issue 1)*.
- Undang-undang Nomor 21. (2001). *Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44901/uu-no-21-tahun-2001>
- Undang-undang Nomor 29. (2007). *Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39922/uu-no-29-tahun-2007>
- Undang-Undang Nomor 44. (1999). *Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45380/uu-no-44-tahun-1999>

LAMPIRAN

I. Tabel Data penelitian

Kab/Kota	Tahun	DAIS (Rp)	Poverty (%)	DAU (juta)	DAK (juta)	DBH (juta)	Growth (%)	Invest (miliar)	TPT (%)
Kota Yogyakarta	2017	7.360.241.900	7,64	658.504,19	170562,68	40347,46	5,24	5307,43	5,08
Kota Yogyakarta	2018	25.695.637.204	6,98	658.504,19	162523,89	44728,93	5,49	4489,27	6,22
Kota Yogyakarta	2019	48.388.321.544	6,84	700.372,56	145960,29	27070,84	5,96	6806,99	4,8
Kota Yogyakarta	2020	53.712.360.784	7,27	627.247,17	142634,3	48878,98	-2,42	7050,23	9,16
Kota Yogyakarta	2021	68.085.760.770	7,69	617.524,29	131991,3	60265,83	5,16	7298,7	9,13
Kota Yogyakarta	2022	50.890.664.529	6,62	611.115,72	226012,14	54597,64	5,12	619,01	7,18
Kota Yogyakarta	2023	92.939.594.774	6,49	640.404,38	171388,66	51995,83	5,08	926,48	6,07
Kota Yogyakarta	2024	84.950.881.380	6,26	673.920,86	208147,9	52503,6	5,05	867,7	5,8
Kab. Bantul	2017	18.654.468.931	14,07	982.250,84	270134,24	34871,17	5,1	882,98	3,12
Kab. Bantul	2018	22.815.198.400	13,43	982.250,84	342620,92	30584,17	5,47	1032,03	2,72
Kab. Bantul	2019	22.475.459.900	12,92	1.015.302, 85	315907,25	19947	5,53	1162,91	3,06
Kab. Bantul	2020	19.708.493.490	13,5	923.213,60	308643,67	35684,04	-1,65	1220,41	4,06
Kab. Bantul	2021	51.568.722.615	14,04	911.168,11	300312,6	41290,85	5	1333,08	4,04
Kab. Bantul	2022	30.460.830.650	12,27	902.030,73	370642,37	34759,24	5,19	576,8	3,97
Kab. Bantul	2023	48.432.601.290	11,95	954.626,88	366489,68	33193,86	5,06	667,29	3,78
Kab. Bantul	2024	55.141.132.897	11,66	1.022.019, 83	442840,66	33999,39	5,04	727,12	3,62
Kab. Kulon Progo	2017	44.602.040.170	20,03	705.868,94	210264,77	25598,37	5,97	1203,96	1,99

Kab. Kulon Progo	2018	56.623.685.320	18,3	705.868,94	247883,11	19015,96	10,83	51626,52	1,49
Kab. Kulon Progo	2019	26.895.848.910	17,39	732.088,72	293857,45	13322,29	13,49	10651,4	1,8
Kab. Kulon Progo	2020	102.452.762.400	18,01	381.278,29	111028,54	13282,42	-3,45	12517,94	3,71
Kab. Kulon Progo	2021	39.653.956.988	18,38	648.511,04	292757,78	29554,28	4,37	13024,56	3,69
Kab. Kulon Progo	2022	62.620.117.764	16,39	643.983,39	245290,82	23146,05	6,58	1323,46	2,8
Kab. Kulon Progo	2023	98.833.371.769	15,64	676.856,22	292961,53	18096,07	5,65	242,39	2,4
Kab. Kulon Progo	2024	101.077.205.874	15,62	729.450,46	286185,92	18086,29	4,77	192,02	2,01
Gunungkidul	2017	26.930.424.925	18,65	938.221,13	283708,65	26468,64	5,01	244,92	1,65
Gunungkidul	2018	33.468.913.750	17,12	938.221,00	303864	20376	5,16	259,93	2,07
Gunungkidul	2019	175.516.118.040	16,61	965.080,00	342547	13057	5,34	338,33	1,92
Gunungkidul	2020	87.909.776.537	17,07	882.566,00	327129	21251	-0,68	370,24	2,16
Gunungkidul	2021	50.825.670.100	17,69	868.017,00	437902	223469	5,31	660,85	2,2
Gunungkidul	2022	40.424.963.290	15,86	865.880,00	424908	26798	5,37	157,83	2,08
Gunungkidul	2023	70.210.319.555	15,6	912.904,00	383314	20812	5,04	192,26	2,09
Gunungkidul	2024	60.492.664.960	15,18	981.792,00	393252	19152	4,81	83,61	2,16
Kab. Sleman	2017	16.615.119.175	8,13	996.492,00	278580	60499,72	5,34	5214,69	3,51
Kab. Sleman	2018	20.771.873.450	7,65	996.492,00	321540	50685,43	6,42	6731,92	4,4
Kab. Sleman	2019	24.101.455.578	7,41	1.035.862,00	301566	33935,95	6,48	7634,32	3,93
Kab. Sleman	2020	44.531.429.000	8,12	938.351,00	273628	59203,52	-4,05	8258,52	5,09
Kab. Sleman	2021	272.529.788.929	8,64	925.964,00	60035	70483,81	5,61	10179,04	5,17
Kab. Sleman	2022	107.644.018.095	7,74	921.381,00	430769	58936,14	5,15	1232,26	4,78

Kab. Sleman	2023	61.802.969.660	7,52	971.708,00	365156	63146,89	5,09	3647,99	4,47
Kab. Sleman	2024	32.435.693.700	7,46	1.047.026,00	409000	67701,04	5,19	2291,44	4,13

Sumber : (Bapperida DIY, 2025), diolah.

Lampiran II. Statistika Deskriptif

	POVERTY	DAIS	DAU	DAK	DBH	GROWTH	INV
Mean	12.39600	59.00625	0.832750	0.284500	0.040250	4.705500	4.480000
Median	13.17500	49.63000	0.905000	0.290000	0.030000	5.160000	1.200000
Maximum	20.03000	272.5300	1.050000	0.440000	0.220000	13.49000	51.60000
Minimum	6.260000	7.360000	0.380000	0.060000	0.010000	-4.050000	0.100000
Std. Dev.	4.515215	47.92322	0.163331	0.096129	0.033626	3.197556	8.524390
Skewness	-0.000831	2.598604	-0.615367	-0.357720	3.916166	-0.837445	4.400483
Kurtosis	1.441831	11.50797	2.483941	2.480715	21.60784	5.723856	24.64119
Jarque-Bera Probability	4.046489 0.132226	165.6608 0.000000	2.968371 0.226687	1.302517 0.521389	679.3287 0.000000	17.04108 0.000199	909.6637 0.000000
Sum	495.8400	2360.250	33.31000	11.38000	1.610000	188.2200	179.2000
Sum Sq. Dev.	795.0996	89568.76	1.040397	0.360390	0.044097	398.7502	2833.944
Observations	40	40	40	40	40	40	40

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 13

Lampiran III. Common Effect

Dependent Variable: POVERTY
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/21/26 Time: 03:01
 Sample: 2017 2024
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	30.41834	3.050081	9.972963	0.0000
DAIS	0.001025	0.008485	0.120793	0.9046
DAU	-10.95428	3.162558	-3.463741	0.0015
DAK	2.765894	6.544052	0.422658	0.6754
DBH	1.635727	12.31642	0.132809	0.8952
GROWTH	-0.236807	0.129929	-1.822590	0.0777
INV	0.016265	0.049851	0.326264	0.7463
TPT	-2.285703	0.270617	-8.446276	0.0000
R-squared	0.770425	Mean dependent var		12.39600
Adjusted R-squared	0.720205	S.D. dependent var		4.515215
S.E. of regression	2.388351	Akaike info criterion		4.755940
Sum squared resid	182.5350	Schwarz criterion		5.093716
Log likelihood	-87.11879	Hannan-Quinn criter.		4.878069
F-statistic	15.34114	Durbin-Watson stat		1.242485
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 13

Lampiran IV. Fixed Effect

Dependent Variable: POVERTY
 Method: Panel EGLS (Cross-section SUR)
 Date: 12/16/25 Time: 10:55
 Sample: 2017 2024
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 40
 Linear estimation after one-step weighting matrix
 Period weights (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.79618	0.830855	17.80839	0.0000
DAIS	-0.006686	0.001171	-5.711215	0.0000
DAU	-0.145176	0.929771	-0.156141	0.8770
DAK	-9.144332	1.084044	-8.435387	0.0000
DBH	10.50307	2.524279	4.160819	0.0003
INV	0.022130	0.006004	3.685636	0.0010
GROWTH	-0.002514	0.020054	-0.125353	0.9011
TPT	0.053866	0.029708	1.813189	0.0805

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.997945	Mean dependent var	19.07574
Adjusted R-squared	0.997137	S.D. dependent var	27.71217
S.E. of regression	1.113844	Sum squared resid	34.73815
F-statistic	1235.991	Durbin-Watson stat	1.902773
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.978487	Mean dependent var	12.39600
Sum squared resid	17.10534	Durbin-Watson stat	1.397085

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 13

Lampiran V. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	69.520176	(4,28)	0.0000
Cross-section Chi-square	95.665772	4	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: POVERTY

Method: Panel Least Squares

Date: 02/21/26 Time: 03:44

Sample: 2017 2024

Periods included: 8

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	30.41834	3.050081	9.972963	0.0000
DAIS	0.001025	0.008485	0.120793	0.9046
DAU	-10.95428	3.162558	-3.463741	0.0015
DAK	2.765894	6.544052	0.422658	0.6754
DBH	1.635727	12.31642	0.132809	0.8952
GROWTH	-0.236807	0.129929	-1.822590	0.0777
INV	0.016265	0.049851	0.326264	0.7463
TPT	-2.285703	0.270617	-8.446276	0.0000
R-squared	0.770425	Mean dependent var		12.39600
Adjusted R-squared	0.720205	S.D. dependent var		4.515215
S.E. of regression	2.388351	Akaike info criterion		4.755940
Sum squared resid	182.5350	Schwarz criterion		5.093716
Log likelihood	-87.11879	Hannan-Quinn criter.		4.878069
F-statistic	15.34114	Durbin-Watson stat		1.242485
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 13

Lampiran VI. Cross Section Fixed Effect

CROSSID	Effect
1	-6.766672
2	1.100241
3	4.929881
4	5.236594
5	-4.500043

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 13

ANALISIS PENGARUH DANA ISTIMEWA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ORIGINALITY REPORT

3% SIMILARITY INDEX	3% INTERNET SOURCES	4% PUBLICATIONS	4% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
2	Submitted to UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Student Paper	1%
3	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
4	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
Exclude bibliography On